PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT*

SK No 190255 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMUTAKHIRAN MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ *MAJOR PROJECT*
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Prioritas Nasional / *Major Project*	**Alokasi (Rp Juta)**	**Instansi Pelaksana**
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1) MP: Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	**281.925,6**	
Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	18.500,0	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Peningkatan produk ber-SNI yang diekspor	1.000,0	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia	12.000,0	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi	3.600,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Formulasi Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.900,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	12.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	4.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	1.400,2	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peningkatan Kapasitas Negosiasi Perundingan Perdagangan Internasional	1.717,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Rekomendasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	19.767,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	3.033,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kebijakan Sektor Jasa	1.097,6	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Sektor Isu Pertanian, Isu Keamanan, dan Ketahanan Pangan	650,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Hasil Perundingan pada Konferensi Tingkat Menteri, Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	2.542,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1.164,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Trade Expo Indonesia	3.632,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi FTA *Center* Jakarta	3.050,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Forum APEC	1.400,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	1.088,2	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	4.312,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi FTA *Center* Semarang	1.499,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
FTA *Support Center*	5.864,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SK No 190242 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	**Alokasi (Rp Juta)**	**Instansi Pelaksana**
Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	1.538,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Monitoring dan Evaluasi PTA/FTA/CEPA	2.062,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerjasama Perdagangan dengan Negara Anggota G20 dan Organisasi PBB	1.470,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kerja Sama Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN Lainnya	1.018,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Forum Kerja Sama Perdagangan Bilateral	2.377,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	5.400,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi	13.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	52.321,5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kajian Pemanfaatan Teknologi *Material Recovery end-of-life tires*	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Partisipasi Indonesia pada *Hannover Messe*	10.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	2.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan *Apparel*	1.975,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0	5.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0	5.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK di Bontang	7.902.220,0	BUMN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pupuk di Palembang		BUMN
Pembangunan Pabrik Soda Ash di Gresik		BUMN
Pembangunan Pabrik Soda Ash di Bontang		BUMN
Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar *Intermediate* dan Bahan Baku Obat (BBO)		BUMN
Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kapasitas 2.500 ton CPO/hari di KEK Sei Mangkei		BUMN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK di Cikampek		BUMN
Pengembangan Industri EV *Battery* Terintegrasi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188181 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan, komisioning dan operasional pabrik biodiesel kapasitas 1000 ton per hari	23.310.000,0	SWASTA
Pembangunan Fasilitas Produksi Telur Ayam SPF (*Specified Pathogen Free*)		SWASTA
Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi		SWASTA
Pembangunan Pabrik Petrokimia		SWASTA
Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi		SWASTA
Pembangunan Industri Baterai Untuk Kendaraan Listrik		SWASTA
Pembangunan Pabrik Petrokimia Terintegrasi		SWASTA
2) MP: Destinasi Pariwisata Prioritas	**4.087.716,0**	
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	6.270,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	20.300,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (35 - Provinsi Jawa Timur)	6.230,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	17.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5203 - Kab. Lombok Timur)	11.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	7.500,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5313 - Kab. Manggarai)	4.500,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	5.653,2	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	14.464,9	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	31.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	6.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9803 - Kab. Raja Ampat)	6.175,0	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	5.795,1	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	8.795,1	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3404 - Kab. Sleman)	8.795,1	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	5.754,5	DAK

SK No 188182 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	5.318,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (33 - Provinsi Jawa Tengah)	11.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1971 - Kota Pangkal Pinang)	10.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	3.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1901 - Kab. Bangka)	14.000,0	DAK
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1224 - Kab. Nias Utara)	3.000,0	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5203 - Kab. Lombok Timur)	8.744,5	DAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	5.795,1	DAK
Perdagangan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	60.000,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3507 - Kab. Malang)	2.601,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	7.019,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	2.267,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5201 - Kab. Lombok Barat)	2.170,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	5.507,1	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5203 - Kab. Lombok Timur)	2.636,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	8.481,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram)	4.557,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	6.832,7	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5313 - Kab. Manggarai)	5.311,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	6.723,6	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	1.729,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7106 - Kab. Minahasa Utara)	2.040,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	5.033,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	7.545,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	4.246,4	DAK

SK No 188183 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	4.577,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	5.771,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9801 - Kab. Sorong)	5.213,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9803 - Kab. Raja Ampat)	3.829,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9806 - Kota Sorong)	11.537,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	7.930,4	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba)	8.521,7	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun)	6.419,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	2.938,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	2.109,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	5.253,7	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	2.177,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	8.133,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1224 - Kab. Nias Utara)	5.934,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (33 - Provinsi Jawa Tengah)	1.933,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	2.501,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang)	3.390,5	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	5.604,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3313 - Kab. Karanganyar)	1.552,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	2.532,0	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3320 - Kab. Jepara)	4.020,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1901 - Kab. Bangka)	2.942,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	2.601,8	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	5.282,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur)	2.730,5	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1971 - Kota Pangkal Pinang)	2.397,2	DAK

SK No 188184 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (2172 - Kota Tanjung Pinang)	2.771,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	4.848,2	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3372 - Kota Surakarta)	1.420,6	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	1.700,3	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	2.341,1	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3402 - Kab. Bantul)	7.374,9	DAK
Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3404 - Kab. Sleman)	2.700,5	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	2.495,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun)	2.291,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	1.221,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	1.887,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	2.952,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	3.019,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1224 - Kab. Nias Utara)	1.425,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	1.425,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	1.025,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	1.598,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	4.734,9	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang)	1.950,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	1.614,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3313 - Kab. Karanganyar)	1.746,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3320 - Kab. Jepara)	1.425,6	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	1.608,8	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3501 - Kab. Pacitan)	1.541,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3507 - Kab. Malang)	1.894,0	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	3.309,3	DAK

SK No 188185 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	2.359,1	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5203 - Kab. Lombok Timur)	1.741,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	1.069,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram)	2.250,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	1.654,2	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7106 - Kab. Minahasa Utara)	1.047,3	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	1.573,7	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	2.503,4	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	1.702,5	DAK
Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9801 - Kab. Sorong)	1.873,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (12 - Provinsi Sumatera Utara)	7.899,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	5.631,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun)	8.475,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi)	7.348,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo)	7.296,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	6.997,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	6.488,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir)	6.179,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1224 - Kab. Nias Utara)	8.573,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	7.845,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1901 - Kab. Bangka)	5.912,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat)	6.042,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan)	8.133,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur)	5.868,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1971 - Kota Pangkal Pinang)	5.341,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (33 - Provinsi Jawa Tengah)	8.418,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo)	5.358,6	DAK

SK No 188186 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo)	7.860,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang)	5.621,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten)	5.340,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3313 - Kab. Karanganyar)	7.208,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen)	4.753,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3320 - Kab. Jepara)	6.043,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3372 - Kota Surakarta)	5.612,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	7.156,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo)	7.155,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3404 - Kab. Sleman)	6.161,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3507 - Kab. Malang)	9.505,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan)	9.087,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	7.390,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5201 - Kab. Lombok Barat)	5.379,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah)	5.799,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5203 - Kab. Lombok Timur)	5.002,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara)	5.058,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	10.075,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada)	7.429,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5313 - Kab. Manggarai)	7.218,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat)	23.587,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	6.497,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung)	5.450,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	8.087,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi)	7.682,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari)	4.823,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau)	6.944,5	DAK

SK No 188187 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (82 - Provinsi Maluku Utara)	6.617,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai)	6.170,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (91 - Provinsi Papua Barat)	7.274,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9801 - Kab. Sorong)	8.589,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9803 - Kab. Raja Ampat)	6.861,4	DAK
Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan	500,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas	249,8	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Sarana dan Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	23.480,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, jasa, dan pariwisata	1.137,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pusat Informasi Geologi	19.353,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan	4.795,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas	1.200,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan	7.690,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sarana prasarana Wisata Bahari	6.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	126.184,3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP	359.986,5	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Jawa Tengah	42.114,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Jawa Timur	31.056,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sumatera Utara	8.884,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Riau	2.221,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sulawesi Utara	2.652,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sulawesi Selatan	13.708,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	12.587,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.341,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Papua	1.903,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Bengkulu	6.485,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Akses Internet	1.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	10.363,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	4.782,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar	10.732,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	9.766,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	16.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK No 188188 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan	32.262,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	5.400,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	2.300,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	2.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Promosi dan Pemasaran Parekraf	2.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba	250,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Publikasi	222.904,1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	21.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi	11.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Prasarana Ruang Kreatif	10.150,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi	18.130,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi	4.100,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Buku *Outlook* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Talenta Digital yang Mendapat Bimbingan Teknis	3.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Festival Film Bulanan	10.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan	11.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan	12.400,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Borobudur	3.308,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SK No 188189 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Produk Wisata dan Kegiatan *(Events)* di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang di Publikasikan	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores	500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
UMKM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	185.025,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	222.348,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	170.040,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan KSPN Super Prioritas	242.271,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan KSPN Super Prioritas	145.573,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dukungan KSPN Super Prioritas	1.206,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba	1.241,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur	281.603,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Lombok Mandalika	32.606,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo	30.620,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	118.140,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi	92.854,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bromo - Tengger - Semeru	145.952,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	840,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP Pekerja	320,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kejuaraan *Multi event* olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi	74.600,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Warisan Budaya yang Dilindungi	21.710,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Bandar Udara Perairan	2.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Matahora	4.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya	150.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN	34.273,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Sibisa, Toba, Sumatera Utara	31.367,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Dermaga Roro Kapal Negara dan Kapal Pelra Wae Kelambu	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Polsek (PN)	29.848,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN)	25.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta – Kulonprogo	17.373.000,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188190 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta –Bawen		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Kawasan Wisata Golo Mori		BUMN
Mandalika *Urban and Tourism Infrastructure Project*		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan KEK Morotai dan *tenant* di dalamnya		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jateng *Valley*		SWASTA
Pengembangan akomodasi wisata berupa *resort* eksklusif		SWASTA
Pembangunan Hotel Bintang (Toba-1)		SWASTA
Pengembangan *Mixed- Use Village*	1.241.700,0	SWASTA
Pengembangan *Luxury* Glamping Pariwisata Toba		SWASTA
Pembangunan Hotel Bintang (Toba-2)		SWASTA
Pembangunan Hotel & MICE		SWASTA
Pembangunan *Cultural Center*		SWASTA
Pembangunan Kampus *King's College* London		SWASTA
Pembangunan Hotel Bintang (Labuan Bajo)		SWASTA
3) MP: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	**557.513,8**	
Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan	500,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka hilirisasi bahan tambang	897,5	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	3.619,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara	1.250,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral	3.451,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	4.100,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	705,9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah II	1.879,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah III	1.374,3	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV	1.873,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	300,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	300,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	13.845,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Eksekusi Proyek Wilayah Timur Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	116.576,2	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 188191 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Website Penanaman Modal	1.500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal	18.520,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2.160,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC (Indonesian Investment Promotion Center)	68.896,3	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	2.361,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Penanganan Kasus *Trade Remedy* dan Hambatan Teknis Perdagangan	5.138,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	750,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	1.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas	15.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	67.422,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	132.465,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Cengkeh	17.440,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kelapa	58.177,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pembangunan Kawasan Industri Subang/Rebana *Technopolis* Subang	2.676.800,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri di Batang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Smelter Nikel Halmahera Timur (P3FH)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Smelter *Grade Alumina Refinery* (SGAR)		BUMN
Pengembangan Pabrik *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) & *High-Pressure Acid Leach* (HPAL)	110.346.080,0	SWASTA
Pembangunan Kawasan Industri Takalar		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pabrik Petrochemical dan Fasilitasnya		SWASTA
Pembangunan Pabrik Perakitan Server		SWASTA
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tanah Kuning		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tanah Kuning		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tanah Kuning		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188192 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan Industri Bintan *Aerospace*		SWASTA
Pembangunan Kawasan Industri Ketapang		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan dan Pengelolaan KEK Galang Batang		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Kawasan Industri Weda Bay		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Sadai		SWASTA
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Surya Borneo		SWASTA
Pembangunan Smelter Timbal		SWASTA
Pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina		SWASTA
Pembangunan Smelter		SWASTA
Pembangunan Pertambangan Bijih Bauksit (07293) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (24202)		SWASTA
Pembangunan Smelter Aluminium		SWASTA
4) MP: Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	**7.508.152,1**	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	36.177,3	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3501 - Kab. Pacitan)	1.138,1	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3503 - Kab. Trenggalek)	4.481,4	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3504 - Kab. Tulungagung)	6.399,1	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3505 - Kab. Blitar)	7.100,0	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3506 - Kab. Kediri)	7.245,9	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3507 - Kab. Malang)	5.438,6	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3508 - Kab. Lumajang)	3.845,0	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3509 - Kab. Jember)	5.360,0	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3512 - Kab. Situbondo)	4.765,0	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3513 - Kab. Probolinggo)	7.958,2	DAK
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3514 - Kab. Pasuruan)	3.639,2	DAK

SK No 188193 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3518 - Kab. Nganjuk)	3.200,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3519 - Kab. Madiun)	3.287,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan)	2.501,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	13.473,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	7.581,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	2.646,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3525 - Kab. Gresik)	4.342,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan)	6.617,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3527 - Kab. Sampang)	1.220,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	4.054,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3572 - Kota Blitar)	3.309,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (36 - Provinsi Banten)	9.978,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	8.571,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	5.478,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali)	11.540,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5102 - Kab. Tabanan)	6.972,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5103 - Kab. Badung)	5.032,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5107 - Kab. Karangasem)	5.564,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng)	5.054,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	19.037,6	DAK	

SK No 188194 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	9.411,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	9.884,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	7.551,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	6.305,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	11.869,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5311 - Kab. Ende)	5.156,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	5.034,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	9.694,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6101 - Kab. Sambas)	7.290,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak)	5.441,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	2.958,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	24.388,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6303 - Kab. Banjar)	6.719,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6304 - Kab. Barito Kuala)	5.237,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	4.669,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	9.307,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	15.298,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	4.714,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	1.535,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	1.138,7	DAK	

SK No 188195 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	16.825,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7202 - Kab. Banggai)	2.973,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali)	2.026,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso)	11.347,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	5.611,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	3.841,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	9.142,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	13.335,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	10.404,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	4.520,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	8.759,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	8.164,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	5.627,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7310 - Kab. Barru)	2.627,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	12.593,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	9.846,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	8.628,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	4.460,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7315 - Kab. Pinrang)	1.310,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	6.580,8	DAK	

SK No 188196 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7326 - Kab. Toraja Utara)	5.293,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	5.355,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana)	4.041,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7411 - Kab. Kolaka Timur)	5.880,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	15.423,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7502 - Kab. Gorontalo)	9.988,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato)	2.115,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	3.848,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	3.277,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7604 - Kab. Mamuju)	4.105,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	14.697,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	8.242,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8104 - Kab. Buru)	5.928,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	19.921,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	15.960,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8205 - Kab. Halmahera Utara)	15.299,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	2.732,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat)	12.740,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9105 - Kab. Manokwari)	1.680,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3305 - Kab. Kebumen)	12.317,1	DAK	

SK No 188197 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3306 - Kab. Purworejo)	2.523,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	24.950,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3308 - Kab. Magelang)	5.969,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3309 - Kab. Boyolali)	3.340,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3310 - Kab. Klaten)	7.657,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo)	5.690,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri)	205,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar)	5.809,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3314 - Kab. Sragen)	256,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan)	30.761,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3316 - Kab. Blora)	8.150,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3318 - Kab. Pati)	23.279,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3321 - Kab. Demak)	11.550,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang)	3.900,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	7.750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	11.950,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3325 - Kab. Batang)	4.980,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	3.223,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang)	6.045,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3329 - Kab. Brebes)	12.850,0	DAK	

SK No 188198 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	5.325,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3401 - Kab. Kulon Progo)	6.500,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3402 - Kab. Bantul)	2.490,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3403 - Kab. Gunungkidul)	5.600,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman)	840,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	54.403,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3502 - Kab. Ponorogo)	2.800,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3503 - Kab. Trenggalek)	7.047,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3504 - Kab. Tulungagung)	821,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3505 - Kab. Blitar)	9.370,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3506 - Kab. Kediri)	8.502,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3507 - Kab. Malang)	25.860,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3508 - Kab. Lumajang)	4.650,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3509 - Kab. Jember)	7.748,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3512 - Kab. Situbondo)	1.100,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3513 - Kab. Probolinggo)	5.080,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3514 - Kab. Pasuruan)	750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3518 - Kab. Nganjuk)	7.256,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3519 - Kab. Madiun)	5.050,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan)	2.850,0	DAK	

SK No 188199 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	22.045,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	2.791,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	17.490,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3525 - Kab. Gresik)	1.235,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan)	359,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3527 - Kab. Sampang)	750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	36.946,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	24.906,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3602 - Kab. Lebak)	8.314,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	1.796,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali)	2.660,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5102 - Kab. Tabanan)	3.327,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5107 - Kab. Karangasem)	4.200,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng)	2.791,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	9.535,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	29.940,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	28.680,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	22.850,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	36.861,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	26.507,3	DAK	

SK No 188200 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	9.424,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5308 - Kab. Lembata)	9.800,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5309 - Kab. Flores Timur)	20.200,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5311 - Kab. Ende)	3.390,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	17.750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	5.449,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6101 - Kab. Sambas)	12.542,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak)	20.920,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6106 - Kab. Ketapang)	1.500,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	4.000,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6111 - Kab. Kayong Utara)	1.500,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	7.000,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6202 - Kab. Kotawaringin Timur)	300,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6207 - Kab. Lamandau)	300,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6271 - Kota Palangkaraya)	600,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	3.840,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6303 - Kab. Banjar)	1.190,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6304 - Kab. Barito Kuala)	872,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	475,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	950,0	DAK	

SK No 188201 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	1.920,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	4.500,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	7.775,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	26.850,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	5.600,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	9.732,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7201 - Kab. Banggai Kepulauan)	2.800,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7202 - Kab. Banggai)	2.550,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali)	1.900,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso)	16.699,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	9.412,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7207 - Kab. Buol)	7.200,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	19.180,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7209 - Kab. Tojo Una Una)	4.800,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	38.665,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	8.490,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	10.910,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	12.911,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	18.270,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	26.471,4	DAK	

SK No 188202 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	2.650,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7310 - Kab. Barru)	2.617,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	8.488,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	16.653,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	24.105,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	8.586,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7315 - Kab. Pinrang)	28.934,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	37.321,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7318 - Kab. Tana Toraja)	7.580,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7325 - Kab. Luwu Timur)	6.750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7326 - Kab. Toraja Utara)	33.140,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	4.200,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7411 - Kab. Kolaka Timur)	25.600,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	3.706,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7502 - Kab. Gorontalo)	6.055,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	5.518,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	15.088,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7604 - Kab. Mamuju)	13.310,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	2.750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	8.827,2	DAK	

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8104 - Kab. Buru)	5.090,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8109 - Kab. Buru Selatan)	2.025,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	5.937,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	34.096,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8205 - Kab. Halmahera Utara)	7.030,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai)	9.025,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	16.673,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat)	5.130,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9105 - Kab. Manokwari)	2.052,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	6.007,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1102 - Kab. Aceh Singkil)	300,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1103 - Kab. Aceh Selatan)	2.550,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1106 - Kab. Aceh Tengah)	9.140,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1107 - Kab. Aceh Barat)	1.000,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1108 - Kab. Aceh Besar)	11.998,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1109 - Kab. Pidie)	10.488,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1110 - Kab. Bireuen)	15.806,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara)	21.862,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1113 - Kab. Gayo Lues)	300,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1117 - Kab. Bener Meriah)	6.550,0	DAK	

SK No 188204 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1173 - Kota Langsa)	1.850,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara)	16.475,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1207 - Kab. Labuhanbatu)	6.400,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	20.320,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	11.100,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1303 - Kab. Solok)	10.931,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1305 - Kab. Tanah Datar)	14.309,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	7.246,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1307 - Kab. Agam)	5.848,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	4.411,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	9.750,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1404 - Kab. Pelalawan)	7.309,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1405 - Kab. Siak)	2.450,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	3.797,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1502 - Kab. Merangin)	8.360,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	11.530,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	4.050,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	10.730,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	2.118,6	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1607 - Kab. Banyuasin)	6.350,0	DAK	

SK No 188205 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	11.342,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	1.700,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	4.772,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1702 - Kab. Rejang Lebong)	3.349,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1706 - Kab. Mukomuko)	19.099,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1707 - Kab. Lebong)	5.350,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	7.896,1	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1802 - Kab. Tanggamus)	4.150,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	15.070,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah)	7.410,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	2.900,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1809 - Kab. Pesawaran)	9.200,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1811 - Kab. Mesuji)	1.399,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1901 - Kab. Bangka)	10.600,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan)	4.150,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau)	3.139,4	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2102 - Kab. Bintan)	1.450,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat)	11.454,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi)	60.575,5	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3203 - Kab. Cianjur)	20.150,0	DAK	

SK No 188206 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3204 - Kab. Bandung)	31.749,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut)	5.110,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya)	21.400,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis)	10.171,8	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3208 - Kab. Kuningan)	14.929,3	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	18.300,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3210 - Kab. Majalengka)	3.600,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3211 - Kab. Sumedang)	6.671,7	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	19.017,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	10.407,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta)	6.040,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3217 - Kab. Bandung Barat)	8.915,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3273 - Kota Bandung)	3.350,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	37.783,9	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	44.510,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3302 - Kab. Banyumas)	6.923,2	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3303 - Kab. Purbalingga)	9.848,0	DAK	
Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3304 - Kab. Banjarnegara)	13.040,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	17.245,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1103 - Kab. Aceh Selatan)	4.820,0	DAK	

SK No 188207 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1106 - Kab. Aceh Tengah)	4.921,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1107 - Kab. Aceh Barat)	2.574,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1108 - Kab. Aceh Besar)	4.519,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1109 - Kab. Pidie)	9.102,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1110 - Kab. Bireuen)	3.470,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara)	3.906,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1113 - Kab. Gayo Lues)	855,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1117 - Kab. Bener Meriah)	3.780,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	12.109,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat)	16.436,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1303 - Kab. Solok)	6.878,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1305 - Kab. Tanah Datar)	8.068,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	4.120,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1307 - Kab. Agam)	8.050,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	16.065,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	8.705,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	965,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1404 - Kab. Pelalawan)	2.835,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1405 - Kab. Siak)	3.965,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	14.931,6	DAK	

SK No 188208 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1502 - Kab. Merangin)	3.402,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	2.636,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	13.213,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	4.826,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1611 - Kab. Empat Lawang)	1.248,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	12.479,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	6.649,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1702 - Kab. Rejang Lebong)	4.284,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1706 - Kab. Mukomuko)	2.200,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1707 - Kab. Lebong)	5.719,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	14.844,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1802 - Kab. Tanggamus)	5.811,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	3.622,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah)	8.630,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	8.840,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1809 - Kab. Pesawaran)	4.917,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1811 - Kab. Mesuji)	2.615,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat)	31.715,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi)	10.627,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3203 - Kab. Cianjur)	8.695,0	DAK	

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3204 - Kab. Bandung)	1.925,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut)	5.700,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya)	1.344,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis)	8.457,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3208 - Kab. Kuningan)	4.950,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	12.662,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3210 - Kab. Majalengka)	6.145,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	5.912,4	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	8.417,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta)	5.180,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang)	3.604,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3217 - Kab. Bandung Barat)	1.915,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	8.742,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	6.433,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3302 - Kab. Banyumas)	6.821,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3303 - Kab. Purbalingga)	3.340,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3304 - Kab. Banjarnegara)	4.430,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3305 - Kab. Kebumen)	5.279,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3306 - Kab. Purworejo)	7.056,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	2.500,0	DAK	

SK No 188210 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3308 - Kab. Magelang)	3.215,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3309 - Kab. Boyolali)	2.573,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3310 - Kab. Klaten)	1.012,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo)	3.522,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri)	4.970,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar)	4.533,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3314 - Kab. Sragen)	6.282,2	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan)	5.715,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3316 - Kab. Blora)	9.136,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3318 - Kab. Pati)	3.260,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang)	6.327,9	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	7.652,7	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	5.436,3	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3325 - Kab. Batang)	3.846,0	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	2.772,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang)	11.708,5	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3329 - Kab. Brebes)	4.723,8	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	6.820,1	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3401 - Kab. Kulon Progo)	3.551,6	DAK	
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3402 - Kab. Bantul)	3.688,9	DAK	

SK No 188211 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3403 - Kab. Gunungkidul)	2.229,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	11.597,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6303 - Kab. Banjar)	11.319,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6304 - Kab. Barito Kuala)	9.267,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	15.822,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	12.961,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	11.327,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (65 - Provinsi Kalimantan Utara)	13.711,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	9.794,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	6.311,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	8.489,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	15.270,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7202 - Kab. Banggai)	9.854,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali)	9.707,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso)	51.837,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala)	27.972,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong)	9.010,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi)	26.200,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	16.024,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba)	28.593,4	DAK

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar)	9.837,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa)	9.744,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai)	10.987,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	6.980,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7310 - Kab. Barru)	9.917,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone)	11.482,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng)	8.735,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo)	10.857,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	9.250,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7315 - Kab. Pinrang)	7.530,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang)	11.206,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7326 - Kab. Toraja Utara)	10.534,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	12.353,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana)	11.097,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7411 - Kab. Kolaka Timur)	10.142,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo)	7.668,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7502 - Kab. Gorontalo)	9.254,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	12.139,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa)	5.735,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7604 - Kab. Mamuju)	6.070,1	DAK	

SK No 188213 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	13.857,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah)	10.781,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8104 - Kab. Buru)	11.430,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara)	11.374,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	9.511,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8205 - Kab. Halmahera Utara)	8.010,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai)	7.693,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	7.778,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh)	12.616,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1103 - Kab. Aceh Selatan)	9.001,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1106 - Kab. Aceh Tengah)	7.543,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1107 - Kab. Aceh Barat)	10.511,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1108 - Kab. Aceh Besar)	9.563,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1109 - Kab. Pidie)	10.279,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1110 - Kab. Bireuen)	8.247,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1117 - Kab. Bener Meriah)	10.095,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara)	13.220,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	11.555,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat)	12.464,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1303 - Kab. Solok)	9.109,6	DAK	

SK No 188214 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1305 - Kab. Tanah Datar)	9.061,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	11.865,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1307 - Kab. Agam)	8.924,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau)	15.639,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	11.350,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1404 - Kab. Pelalawan)	12.118,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1405 - Kab. Siak)	13.818,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi)	12.043,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1502 - Kab. Merangin)	10.787,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari)	9.725,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	10.564,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	11.419,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	12.878,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1606 - Kab. Musi Banyuasin)	9.704,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	6.590,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu)	13.881,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	11.142,0	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1702 - Kab. Rejang Lebong)	11.185,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1706 - Kab. Mukomuko)	9.125,2	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1707 - Kab. Lebong)	9.505,2	DAK

SK No 188215 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung)	12.223,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1802 - Kab. Tanggamus)	9.472,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	9.471,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah)	11.515,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang)	8.894,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1809 - Kab. Pesawaran)	10.734,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1811 - Kab. Mesuji)	10.326,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau)	8.925,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2102 - Kab. Bintan)	8.376,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi)	11.485,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3203 - Kab. Cianjur)	10.470,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3204 - Kab. Bandung)	8.141,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut)	8.529,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya)	8.105,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis)	11.598,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3208 - Kab. Kuningan)	8.321,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon)	7.175,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3210 - Kab. Majalengka)	10.923,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3211 - Kab. Sumedang)	8.049,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang)	7.594,9	DAK	

SK No 188216 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta)	7.275,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang)	9.058,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah)	21.037,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap)	11.616,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3302 - Kab. Banyumas)	9.832,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3303 - Kab. Purbalingga)	8.179,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3304 - Kab. Banjarnegara)	5.801,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3305 - Kab. Kebumen)	12.331,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3306 - Kab. Purworejo)	7.665,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo)	11.222,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3308 - Kab. Magelang)	8.162,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3309 - Kab. Boyolali)	7.785,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3310 - Kab. Klaten)	7.423,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo)	7.274,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri)	8.280,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar)	8.100,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3314 - Kab. Sragen)	7.072,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan)	8.382,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3316 - Kab. Blora)	6.967,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3318 - Kab. Pati)	11.420,2	DAK	

SK No 188217 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3321 - Kab. Demak)	7.007,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang)	8.763,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung)	6.943,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal)	7.807,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3325 - Kab. Batang)	6.643,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	9.023,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang)	7.416,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3329 - Kab. Brebes)	9.120,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	9.475,0	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3401 - Kab. Kulon Progo)	9.873,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3402 - Kab. Bantul)	7.518,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3403 - Kab. Gunungkidul)	7.597,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman)	8.897,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)	16.697,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3503 - Kab. Trenggalek)	11.479,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3504 - Kab. Tulungagung)	11.288,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3505 - Kab. Blitar)	11.486,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3506 - Kab. Kediri)	9.105,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3507 - Kab. Malang)	13.873,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3508 - Kab. Lumajang)	23.097,7	DAK	

SK No 188218 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3509 - Kab. Jember)	35.081,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3512 - Kab. Situbondo)	8.730,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3513 - Kab. Probolinggo)	10.723,2	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3514 - Kab. Pasuruan)	12.836,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3518 - Kab. Nganjuk)	9.529,9	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3519 - Kab. Madiun)	9.586,8	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi)	7.558,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	5.309,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan)	9.950,6	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3525 - Kab. Gresik)	8.281,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan)	8.178,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3527 - Kab. Sampang)	5.991,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep)	11.075,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (36 - Provinsi Banten)	9.972,1	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang)	29.491,5	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3602 - Kab. Lebak)	8.394,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang)	12.642,7	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali)	9.359,4	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5102 - Kab. Tabanan)	9.760,3	DAK	
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5103 - Kab. Badung)	18.926,8	DAK	

SK No 188219 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5107 - Kab. Karangasem)	9.565,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng)	11.244,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	12.404,9	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	8.144,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	7.800,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	9.090,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu)	8.629,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima)	9.021,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	9.746,5	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	17.018,7	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5311 - Kab. Ende)	10.017,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao)	7.861,1	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	16.294,3	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6101 - Kab. Sambas)	40.193,6	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak)	7.164,8	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	8.697,4	DAK
Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya)	9.230,6	DAK
Usaha Pembudidaya Ikan yang dibina dan dikembangkan (MP Korporasi)	2.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	10.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	4.320,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Pengolahan Hasil KP (MP Korporasi)	1.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 188220 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Sumatera Utara	87,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Model Pertanian Modern	3.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	6.032,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Lada	6.352,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi	285.975,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	339.012,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	179.350,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Pertanian	160.165,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	6.059,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Pala	18.202,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan	114.280,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	82.080,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Usaha Ternak	27.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan	1.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pelaku Usaha Yang Mendapat Akses Pembiayaan	20.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Cengkeh	17.440,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan	15.545,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Tebu	32.058,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan	15.545,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kelapa	58.177,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Vanili	5.887,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Perbengkelan Alsintan	9.275,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sagu	10.544,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Kayu	11.243,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Jalar	5.326,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Aneka Umbi Lainnya	6.675,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Padi	592.443,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Jagung	223.402,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
5) MP: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	**4.563.987,9**	
Infrastruktur Energi Terbarukan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	88.000,0	DAK
Rumusan kebijakan di bidang BUMN dalam pengembangan *EV Battery*	166,5	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Volume *Biofuel* untuk Domestik	2.006,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SK No 188221 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	436,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	414,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya	1.173,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penurunan Intensitas Energi Final	8.886,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	222,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	672,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTMH	56.984,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penawaran Wilayah Panas Bumi	1.030,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik	100,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penetapan Wilayah Panas Bumi	1.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTS Terpadu	99.543,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
PLTM	36.871,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	2.712,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Diklat Industri Bidang KEBTKE	3.198,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	5.094,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	152.476,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	4.102.462,2	KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1.500 ton RBDPO/hari di KEK Sei Mangkei	1.444.810,0	BUMN
Penanaman Biomassa untuk mendukung Rencana Proyek Strategis :*New Factory* dan Komersialisasi Produk Biomassa		BUMN
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pengembangan Panas Bumi di Area Patuha Utara, Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha (Jawa Barat)		BUMN
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan : Pengembangan Panas Bumi di Area Candradimuka, Wilayah Kerja Panas Bumi Daerah Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah)		BUMN
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan: Pengembangan Panas Bumi di Dieng dan Patuha Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2		BUMN
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan: Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Arjuno Welirang (Jawa Timur)		BUMN

SK No 188222 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan: Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Candi Umbul Telomoyo (Jawa Tengah)		BUMN
Pembangunan PLTM Cikotok		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kertamukti		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS Bali Barat		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS Bali Timur		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Tuik		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sisira		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Simonggo		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sidikalang 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Raisan Nagatimbul		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Raisan Hutadolok		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Rahu 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Rabi Jonggor	9.615.560,0	SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Ordi Hulu		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Pantan Cuaca		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kukusan 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sumber Jaya		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTA Merangin		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Lae Ordi-1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kineppen		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Ketaun 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kanzy 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kandibata 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188223 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTM Huta Padang		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bendungan PU Batanghari		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 5		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 4		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTA Batang Toru		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Aek Tomuan-1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Aek Situmandi		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTB Tanah Laut Tahap 1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTB Tanah Laut Tahap 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bone Bolango		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bungin III		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Belajen		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Koro Yaentu		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Dominanga		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTSa		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBg		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan RDF Plant		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 35 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 10 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 50 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188224 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
6) MP: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	**605.534,5**	
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan)	4.719,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur)	4.555,4	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu)	8.445,5	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan)	4.391,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang)	5.407,8	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3329 - Kab. Brebes)	7.011,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3513 - Kab. Probolinggo)	4.994,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban)	5.711,2	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3525 - Kab. Gresik)	1.781,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	2.066,4	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur)	9.640,0	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa)	8.868,8	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	5.594,8	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7304 - Kab. Jeneponto)	7.556,6	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros)	8.251,7	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7315 - Kab. Pinrang)	8.404,9	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu)	9.055,9	DAK
SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Lampung	80,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat	992,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 188225 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Tengah	342,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur	1.923,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 2 - Provinsi Nusa Tenggara Barat	685,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sulawesi Selatan	581,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	139.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster kawasan di Lokasi *Major Project* Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	12.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	2.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana pengolahan Hasil KP	15.355,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan - IISAP	70.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	9.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT	7.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	796,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	2.400,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	863,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi - Pusat	101.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi	101.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7) MP: Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional	**134.071,4**	
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir)	5.483,1	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	6.099,3	DAK
Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku)	38.020,5	DAK
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	21.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Pasar Ikan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFPIFM I	100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	31.872,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	20.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembangunan UPI (Unit Pengolahan Ikan) di Bacan dan Ambon	121.000,0	BUMN

SK No 188226 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
8) MP: *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	**643.254,2**	
Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	603,7	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	15.903,4	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	760,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	1.628,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	11.388,8	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	7.523,1	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	10.245,3	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1607 - Kab. Banyuasin)	1.286,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5306 - Kab. Belu)	3.019,2	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5316 - Kab. Sumba Tengah)	13.438,2	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6203 - Kab. Kapuas)	5.783,4	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6210 - Kab. Pulang Pisau)	11.379,5	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9420 - Kab. Keerom)	4.949,4	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9501 - Kab. Merauke)	7.438,3	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	3.719,5	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	3.667,5	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (94 - Provinsi Papua)	2.162,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (12 - Provinsi Sumatera Utara)	37.145,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	6.171,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	9.866,8	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	5.990,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	5.954,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	7.125,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188227 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1607 - Kab. Banyuasin)	2.922,2	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	10.082,1	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5306 - Kab. Belu)	3.510,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5316 - Kab. Sumba Tengah)	5.230,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	13.917,5	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6203 - Kab. Kapuas)	8.193,8	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6210 - Kab. Pulang Pisau)	4.955,7	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9420 - Kab. Keerom)	5.645,6	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (95 - Provinsi Papua Selatan)	14.193,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9501 - Kab. Merauke)	4.301,9	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara	154,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara	141,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan	5,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan	4,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur	146,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur	211,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah	118,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah	105,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Bantuan Saran Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung *Food Estate*	150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188228 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*) - Provinsi Kalimantan Tengah	88,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*) - Kab. Kapuas	75,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Bantuan Saran Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung *Food Estate* - Kab. Kapuas	150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Nusa Tenggara Timur	87,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (MP *Food Estate*) - Pusat	150,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP *Food Estate*)	71.130,4	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP *Food Estate*) - Provinsi Sumatera Utara	70.200,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (MP FE) - Provinsi Kalimantan Tengah	550,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Sayuran Lainnya (MP-FE) - Provinsi Kalimantan Tengah	360,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Penyaluran Bantuan Benih Padi (MP FE) - Provinsi Kalimantan Tengah	3.737,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan (MP FE) - Provinsi Kalimantan Tengah	162,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Jagung	223.402,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Ternak Unggas (MP FE) - Kab. Tanah Laut	1.605,6	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
9) MP: Pengelolaan Terpadu UMKM	**1.043.393,3**	
Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	3.737,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Layanan Pembinaan Penerapan SNI	2.197,0	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM	4.100,0	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	5.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	225.407,5	KEMENTERIAN AGAMA
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Kalimantan Timur	626,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	2.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kemitraan Usaha Nasional	19.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	12.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 188229 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis - Pusat	1.294,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha - Pusat	7.171,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha	3.617,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	7.486,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pendataan Lengkap KUMKM	385.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	2.630,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan melalui Dunia Usaha Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	8.300,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Provinsi Aceh	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Aceh	625,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Aceh	618,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Provinsi Aceh	7.192,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern - Provinsi Aceh	2.079,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Aceh	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sumatera Utara	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sumatera Utara	54,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Sumatera Utara	494,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Batu Bara	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Jawa Tengah	54,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Jawa Tengah	64,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Jawa Tengah	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kelompok/Klaster Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi Standardisasi Kompetensi SDM Usaha Mikro - Provinsi Jawa Tengah	2.473,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Sukoharjo	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Provinsi DI Yogyakarta	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi DI Yogyakarta	679,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SK No 188230 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi DI Yogyakarta	716,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi DI Yogyakarta	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi DI Yogyakarta	1.069,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk - Provinsi DI Yogyakarta	3.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Bali	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Bali	250,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Bali	70,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Jembrana	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Provinsi Nusa Tenggara Timur	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Nusa Tenggara Timur	572,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Nusa Tenggara Timur	531,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Selatan	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Selatan	54,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Kalimantan Selatan	64,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Tanah Laut	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Timur	3.877,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Kalimantan Timur	540,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Timur	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Kutai Kartanegara	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk - Provinsi Sulawesi Utara	2.207,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Sulawesi Utara	260,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern - Provinsi Sulawesi Utara	1.650,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SK No 188231 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Utara	146,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif - Provinsi Sulawesi Utara	1.229,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Utara	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Minahasa Selatan	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Selatan	4.905,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Sulawesi Selatan	111,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Selatan	609,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi - Kab. Pangkajene dan Kepulauan	83,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perempuan Penyintas Kekerasan yang Diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan	3.900,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	14.090,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	147.636,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer	1.010,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi sertifikasi Produk Manufaktur	2.200,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Export Coaching Program	5.892,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	3.612,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	1.500,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	14.131,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	21.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan - Provinsi Kalimantan Timur	362,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan	230,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan	575,0	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
10) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	**881.954,8**	
Bundaran Punggur	79.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	74.800,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

SK No 188232 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - *Underpass* Pelita)	66.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan Alternatif Bandara	94.370,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang - Kota Batam	6.938,9	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang - Kota Batam	149.905,6	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi - Kota Batam	230.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
WTP 230 l/dtk di Waduk Monggak - Kota Batam	120.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
PBK Provinsi Kepulauan Riau - Kota Tanjung Pinang	1.777,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	2.300,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - SIALANG - SP. PENGUNDANG (KM. 46)	47.363,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pengembangan Bandara Hang Nadim	1.348.800,0	BUMN
11) MP: Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	**2.147.804,2**	
PBK Provinsi Kalimantan Selatan	8.600,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Sulawesi Selatan	13.708,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK Provinsi Bali	8.991,7	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP - Kota Makassar	25.750,3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Bali - Kab. Badung	25.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Palembang - Kota Palembang	120.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang - Kota Palembang	28.563,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Bali - Kab. Badung	46.845,6	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar - Kota Makassar	899,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Bendungan Pamukkulu yang dibangun - Pusat	22.537,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang dibangun	10.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188233 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Jalintim Sumsel - Jalan Lintas Timur Sumatera - Provinsi Sumatera Selatan	223.616,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Sidan yang dibangun - Provinsi Bali	407.231,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan SPAM Regional - Kab. Gowa	213.280,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Maros	9.200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kota Makassar	23.608,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang	84.037,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	33.733,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembelian Layanan (*Buy The Service*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional)	40.682,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembelian Layanan (*Buy The Service*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional)	56.785,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional)	45.059,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Makassar (Prioritas Nasional)	54.119,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun lintas Makassar-Parepare - Provinsi Sulawesi Selatan	109.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (Dukungan/Pendamping KPBU) - Kota Makassar	267.490,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Perkeretaapian Makassar Pare - Pare	267.490,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
12) MP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	**29.197.797,5**	
Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN - Pusat	5.500,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (Terintegrasi dengan PSN)
Peta Zona Nilai Tanah (Hektar) - Provinsi Kalimantan Timur	1.205,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Rumusan kebijakan di bidang BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN	149,2	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Terintegrasi dengan PSN)
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa - Pusat	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Pusat	700,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik - Pusat	550,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188234 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Surveilans dan Mitigasi Penemuan Kasus dalam Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di IKN (LP-9) - Pusat	79,6	KEMENTERIAN KESEHATAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan dan Pengembangan RS IKN - Provinsi Kalimantan Timur	742.392,0	KEMENTERIAN KESEHATAN (Terintegrasi dengan PSN)
PBK Provinsi Kalimantan Timur	3.243,5	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan IKN (PN)	692,9	KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Hasil Evaluasi Peran APBN pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	231,6	KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Penyiapan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara	400,0	KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	206,6	KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggara Pos di IKN	4.690,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Study Awal Rencana Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Televisi Digital Publik di IKN	392,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara	10.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru	3.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru	5.210,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru	3.000,0	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Konservasi Keanekaragaman Hayati di IKN	10.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di IKN	2.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	22.930,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN)	104.209,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188235 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN)	133.082,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek	71.747,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur	6.424.676,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur	42.934,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur	645,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - JALAN BEBAS HAMBATAN (SEKSI 1, 4A, 4B, 5B, 6)	6.903.558,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang KKT Kariangau (IKN)	1.602.734,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - JALAN TOL IKN SEGMEN KKT KARIANGAU - SP. TEMPADUNG	633.063,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - JALAN TOL IKN SEGMEN SP. TEMPADUNG - JEMBATAN PULAU BALANG	661.193,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN	1.605.027,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan IKN	1.060.262,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan SPAM IKN	796.355,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	7.821.817,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	71.387,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Sistem Transportasi Ibukota Nusantara	2.216,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Tahap IV, Samarinda, Kalimantan Timur - Kota Samarinda	80.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN - Pusat	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	10.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Terintegrasi dengan PSN)
Informasi hasil pelaksanaan Rencana Sarana dan Prasarana Dasar	88,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188236 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Koordinasi Bidang Investasi dan Kemudahan Investasi	3.212,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar	3.271,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Dasar	2.030,7	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Perencanaan Makro	10.000,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Rencana Pengembangan Kawasan IKN lingkup Perencanaan Makro	2.150,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	2.936,8	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Investasi dan Kemudahan Investasi	1.168,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pelayanan Dasar	1.538,5	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Pelayanan Dasar	1.455,2	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	3.080,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pengembangan Ekosistem Digital	5.185,9	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	2.018,3	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pelatihan Kelompok Masyarakat	1.500,2	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Layanan Pertanahan	7.440,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan	5.317,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Layanan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintah dan perizinan pembangunan	1.969,5	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi	858,1	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.077,7	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Perencanaan Mikro	37.928,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi	3.327,5	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Sarana Prasarana Sosial	2.030,7	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Rencana Pengembangan Kawasan IKN lingkup Perencanaan Mikro	3.150,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Pendanaan	3.212,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pendanaan	1.030,1	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Sosial	1.451,1	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188237 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	534,7	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Transformasi Hijau	4.495,8	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	2.800,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Data dan Kecerdasan Buatan	5.456,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Ketahanan Pangan	954,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pertanahan	12.500,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	3.327,5	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	3.907,1	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Rencana Pengembangan Kawasan IKN lingkup Perencanaan Pertanahan	2.150,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pembiayaan	1.033,4	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Pembiayaan	3.212,6	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Kebijakan Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	1.451,1	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	2.030,7	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Pengelolaan Pertanahan Kawasan IKN	2.150,0	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan SP.3. Riko - Petung	190.355,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pembangkit, Jaringan Distribusi dan Transmisi Kaltim – Kaltara	2.805.410,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi IKN		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi (PLT) di IKN KIPP 1A		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Kantor Wilayah		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Distribusi IKN		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS IKN 50 MW		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188238 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
13) MP: Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	**319.010,4**	
PBK Provinsi Banten	2.476,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PBK UPTP - Kota Sorong	17.425,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih - Kota Sorong	64,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi - Kota Sorong	40,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja - Kota Sorong	2.040,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) - SIMP. DODINGA - SOFIFI	4.261,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - SIMP. DODINGA - SOFIFI	2.204,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - SIMP. DODINGA - SOFIFI	18.275,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong	41.411,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SPAM Karian - Serpong (*Unsolicited*) (Sisi Hulu) - Konstruksi Investasi BUP	810,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan, Bulungan, Kalimantan Timur - Kab. Bulungan	20.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore Kepulauan	60.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya - Kota Sorong	150.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
14) MP: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	**4.317.785,5**	
Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Pusat	78.748,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama	316,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Sorong	250,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Peta Tematik dan Sistematik Geologi Kelautan - Kab. Raja Ampat	1.461,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV - Pusat	1.873,5	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Eksekusi Proyek Wilayah Timur Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi - Pusat	1.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan - Kota Sorong	1.150,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten - Kota Sorong	8.088,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21) - Pusat	10.277,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa (LP-1) - Provinsi Papua Pegunungan	201,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja UPTD-INPRES 9 2020 - Pusat	2.093,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja - Kota Sorong	2.040,9	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SK No 188239 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
PBK UPTP - Kota Sorong	17.425,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pelatihan Peningkatan Produktivitas - Kota Sorong	532,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
OM BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat - Pusat	1.001.271,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat - Pusat	205.409,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat - Pusat	3.214,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Diseminasi Informasi di Wilayah 3T melalui PIP - Pusat	7.814,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) - Kab. Sorong	50.273,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan - Kab. Jayawijaya	500,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Produk dan Aktivitas Wisata Minat Khusus - Pusat	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jejaring Pelaku Wisata Minat Khusus - Pusat	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Kegiatan (*Events*) Nasional dan Internasional - Pusat	88.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pendukungan *Event* Daerah - Pusat	64.957,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jejaring Promosi Wisata Minat Khusus - Pusat	4.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Bidding dan *Delegate Boosting* MICE yang diselenggarakan	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Konten Promosi Wisata Minat Khusus	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional	4.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Event Konferensi yang diselenggarakan	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pemasaran MICE Yang di promosikan lewat Media	1.150,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun - Pusat	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	3.391,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Strategis (ProPN) - YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	2.545,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) - USILIMO - KARUBAGA	12.642,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA	33.314,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Strategis (ProPN) - USILIMO - KARUBAGA	14.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - USILIMO - KARUBAGA	7.367,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188240 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KARUBAGA - ILU - MULIA	26.497,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ORANSBARI - RANSIKI	1.477,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WANGGAR - KWATOSPRE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	57.290,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN DRS ESAU SESA - ORANSBARI	3.510,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - JALAN DRS ESAU SESA - ORANSBARI	20.920,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN DRS ESAU SESA - ORANSBARI	1.269,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong	65.047,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	126.060,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN SEREDALA-DEKAI 1	18.659,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN LANDIK (JALAN WAMENA-ELELIM)	16.570,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - MAMEH - WINDESI (WERABUR)	15.092,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - BTS.KAB.SORONG SELATAN-KAMBUAYA	5.068,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KAMBUAYA-KUMURKEH	25.152,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Rutin Jembatan - KAMBUAYA-KUMURKEH	2.420,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SISU - SNOPY - KEBAR	10.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ALIH TRASE GUNUNG PASIR	202.634,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong	41.411,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - KAMBUAYA-KUMURKEH	171.769,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jembatan Manokwari - Bandara (Alih Trase Bandara Rendani)	436.735,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SORONG - MAKBON	4.630,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO	1.755,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN	13.687,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG)	15.822,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAKBON - MEGA	34.834,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Papua	1.133,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA)	68.552,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188241 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	19.235,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAMENA - HABEMA	3.280,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	22.497,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - Kab. Jayawijaya	4.766,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - Kab. Nduga	153.377,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Raja Ampat	7.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Warisan Budaya yang Dilindungi - Pusat	21.710,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) - Pusat	7.799,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Pusat	107.501,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG	2.016,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG	10.614,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG	12.678,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG	4.285,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Babo - Kab. Teluk Bintuni	9.905,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - Kab. Teluk Bintuni	8.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Manokwari Selatan	26.502,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - Kab. Manokwari Selatan	1.650,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Anggi - Kab. Pegunungan Arfak	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya - Kota Sorong	150.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kota Sorong	15.175,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Jayawijaya	29.206,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Jayawijaya	7.981,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap IV, Jayawijaya, Papua Pegunungan - WAMENA (Kab. Jayawijaya)	102.914,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - Kab. Jayawijaya	9.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 188242 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yahukimo	32.088,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Yahukimo	10.031,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Yahukimo	1.008,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yahukimo	3.364,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Pegunungan Bintang	10.557,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	47.793,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Pegunungan Bintang	4.708,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan - Kab. Pegunungan Bintang	76.783,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Yalimo	37.139,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah - ILAGA (Kab. Puncak)	120.537,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Agandugume - Kab. Puncak	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan - Kab. Yalimo	30.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni - Pusat	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan - Provinsi Papua Barat	2.271,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan - Provinsi Papua Barat	1.091,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Kelapa - Kab. Teluk Wondama	615,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lahan Pertanian Pangan Produktif - Kab. Teluk Bintuni	1.098,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Teluk Bintuni	1.157,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) - Kab. Manokwari	12.082,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Manokwari	1.157,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sagu - Kab. Sorong Selatan	876,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sagu - Kab. Sorong	876,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lahan Pertanian Pangan Produktif - Kab. Sorong	1.150,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Sorong	1.159,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kakao - Kab. Manokwari Selatan	618,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Manokwari Selatan	1.160,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan - Kab. Jayawijaya	1.159,9	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 188243 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
15) MP: Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	**135.387,9**	
Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif	900,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana - Pusat	800,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana Alam - Provinsi Sulawesi Tengah	1.250,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah	37.592,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana - Kota Palu	49.975,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial - Pusat	21.500,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	21.500,4	KEMENTERIAN SOSIAL
16) MP: PKSN Kawasan Perbatasan Negara	**533.362,8**	
Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi MP PKSN Perbatasan Negara	1.000,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Jalan (6504 - Kab. Nunukan)	8.011,5	DAK
Transportasi Perairan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (6504 - Kab. Nunukan)	1.750,0	DAK
Jalan (5306 - Kab. Belu)	6.220,5	DAK
Jalan (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	8.513,4	DAK
Jalan (9501 - Kab. Merauke)	13.871,7	DAK
Transportasi Perairan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (9501 - Kab. Merauke)	2.375,0	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	11.336,5	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (5306 - Kab. Belu)	11.753,5	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (6504 - Kab. Nunukan)	8.163,8	DAK
Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi (9501 - Kab. Merauke)	13.189,3	DAK
Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (6504 - Kab. Nunukan)	9.384,8	DAK
Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (5306 - Kab. Belu)	9.162,4	DAK
Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	11.056,4	DAK
Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9501 - Kab. Merauke)	15.902,0	DAK

SK No 188244 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Nunukan	328,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Merauke	545,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	32.691,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	1.504,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	14.696,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	3.721,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi)	40.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandara AA Beretalo	20.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Wini - Kab. Timor Tengah Utara	15.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Sambas	10.400,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandara Long Bawan - Kab. Nunukan	20.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Nunukan - Kab. Nunukan	9.503,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan	70.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kab. Merauke	46.784,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis - Kab. Merauke	40.419,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Merauke	2.498,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandara Mopah-Merauke Papua Selatan - Kab. Merauke	40.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada Distrik Navigasi Kelas III Merauke - Kab. Merauke	31.430,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kawasan Kelapa - Kab. Merauke	616,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
17) MP: Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	**48.186,8**	
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Barat	1.187,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Tengah	1.108,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Timur	1.315,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tengah	1.033,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188245 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Data GTRA Provinsi - Provinsi Nusa Tenggara Barat	955,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Bengkulu	1.053,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Banten	977,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Bengkulu	1.136,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Jawa Barat	1.168,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) - Provinsi Jawa Barat	1.312,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Barat	2.330,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Jawa Tengah	1.142,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Tengah	1.969,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Jawa Timur	51,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur	684,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SK Redistribusi Tanah Kategori V - Provinsi Jawa Timur	1.131,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Jawa Timur	1.542,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Timur	2.432,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Jawa Timur	1.719,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Banten	1.166,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Nusa Tenggara Barat	54,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 - Provinsi Nusa Tenggara Barat	274,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188246 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.170,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori II - Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.659,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Kabupaten/Kota - Provinsi Sulawesi Tengah	1.163,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Sulawesi Tengah	763,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Bengkulu	525,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Barat	600,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Timur	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Banten	525,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tengah	375,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Barat	313,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Jawa Timur	87,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Bengkulu Utara	1.819,1	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen Hortikultura - Provinsi Jawa Barat	2.160,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Garut	134,3	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Garut	165,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Garut	360,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen Hortikultura - Provinsi Jawa Timur	2.640,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
18) MP: Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*	**48.973.181,5**	
Pelatihan dan *Refreshing* dalam rangka percepatan penurunan *stunting*	6.683,4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

SK No 188247 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat nasional	95.532,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Pusat Pengendali data *stunting*	2.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Laporan Monitoring *stunting* terpadu	1.496,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus *Stunting* provinsi	4.800,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan kab/kota	76.680,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan *stunting* dan mendukung penurunan AKI	9.753,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*	10.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	29.750,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	31.729,3	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dan kab/kota	98.150,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Laporan Monitoring dan evaluasi TPK TPPS SATGAS percepatan penurunan *stunting* provinsi kab/kota	6.600,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat	11.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi	24.945,4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Humas Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi	4.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tk provinsi	2.288,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	1.160,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	14.167,6	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	1.937,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	507.351,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan	144,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting*	25.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting*	22.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	16.800,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas	6.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan *stunting*	30.277,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

SK No 188248 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus	29.581,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelaksanaan pelatihan penanggulangan *stunting* dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan	1.000,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.500,0	BADAN PANGAN NASIONAL
Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	1.677,4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1.807,5	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (11 - Provinsi Aceh)	6.747,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1101 - Kab. Simeulue)	1.161,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1102 - Kab. Aceh Singkil)	303,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1103 - Kab. Aceh Selatan)	2.615,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	4.777,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1105 - Kab. Aceh Timur)	981,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1106 - Kab. Aceh Tengah)	332,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1107 - Kab. Aceh Barat)	1.031,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1108 - Kab. Aceh Besar)	3.131,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1109 - Kab. Pidie)	942,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1110 - Kab. Bireuen)	3.679,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1111 - Kab. Aceh Utara)	6.614,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1113 - Kab. Gayo Lues)	632,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	327,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1115 - Kab. Nagan Raya)	683,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1116 - Kab. Aceh Jaya)	4.337,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1117 - Kab. Bener Meriah)	569,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1171 - Kota Banda Aceh)	2.051,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1172 - Kota Sabang)	417,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1175 - Kota Subulussalam)	3.517,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7203 - Kab. Morowali)	2.014,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7204 - Kab. Poso)	2.542,1	DAK

SK No 188249 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7209 - Kab. Tojo Una Una)	299,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7210 - Kab. Sigi)	5.324,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7271 - Kota Palu)	2.714,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	8.117,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7302 - Kab. Bulukumba)	1.214,2	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7304 - Kab. Jeneponto)	1.836,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7305 - Kab. Takalar)	566,6	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7306 - Kab. Gowa)	1.428,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7307 - Kab. Sinjai)	277,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7308 - Kab. Maros)	3.489,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	3.794,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7311 - Kab. Bone)	1.582,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7312 - Kab. Soppeng)	1.435,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7313 - Kab. Wajo)	1.374,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	209,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7316 - Kab. Enrekang)	748,2	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7317 - Kab. Luwu)	2.800,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7318 - Kab. Tana Toraja)	1.342,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7325 - Kab. Luwu Timur)	983,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7326 - Kab. Toraja Utara)	1.399,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7371 - Kota Makassar)	795,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7372 - Kota Pare Pare)	1.054,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7373 - Kota Palopo)	1.771,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	10.590,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7402 - Kab. Muna)	2.816,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7403 - Kab. Konawe)	2.293,7	DAK	

SK No 188250 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7404 - Kab. Kolaka)	2.496,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7405 - Kab. Konawe Selatan)	1.299,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7406 - Kab. Bombana)	6.383,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7408 - Kab. Kolaka Utara)	2.433,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7409 - Kab. Buton Utara)	5.093,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7410 - Kab. Konawe Utara)	5.494,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7411 - Kab. Kolaka Timur)	2.280,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	9.090,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7413 - Kab. Muna Barat)	4.897,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7414 - Kab. Buton Tengah)	11.241,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7415 - Kab. Buton Selatan)	6.812,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7471 - Kota Kendari)	316,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7472 - Kota Bau Bau)	2.704,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7501 - Kab. Boalemo)	1.805,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7502 - Kab. Gorontalo)	959,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7503 - Kab. Pohuwato)	699,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7504 - Kab. Bone Bolango)	2.579,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7571 - Kota Gorontalo)	2.546,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	3.112,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7604 - Kab. Mamuju)	924,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7605 - Kab. Pasangkayu)	3.105,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	3.250,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (81 - Provinsi Maluku)	15.111,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8101 - Kab. Kepulauan Tanimbar)	799,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	2.700,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8103 - Kab. Maluku Tengah)	4.691,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8104 - Kab. Buru)	1.772,5	DAK

SK No 188251 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8106 - Kab. Seram Bagian Barat)	3.379,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8107 - Kab. Seram Bagian Timur)	2.741,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8108 - Kab. Maluku Barat Daya)	3.149,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8109 - Kab. Buru Selatan)	1.044,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8171 - Kota Ambon)	888,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8172 - Kota Tual)	7.087,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (82 - Provinsi Maluku Utara)	11.401,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8201 - Kab. Halmahera Barat)	2.600,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8205 - Kab. Halmahera Utara)	3.619,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8206 - Kab. Halmahera Timur)	315,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8207 - Kab. Pulau Morotai)	2.375,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8208 - Kab. Pulau Taliabu)	6.198,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	230,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (91 - Provinsi Papua Barat)	14.230,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9101 - Kab. Fak Fak)	1.731,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9102 - Kab. Kaimana)	2.043,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9104 - Kab. Teluk Bintuni)	2.205,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9111 - Kab. Manokwari Selatan)	8.860,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (94 - Provinsi Papua)	7.470,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9403 - Kab. Jayapura)	2.903,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9420 - Kab. Keerom)	7.536,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9426 - Kab. Waropen)	2.286,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9428 - Kab. Mamberamo Raya)	7.600,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9504 - Kab. Asmat)	1.101,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9601 - Kab. Nabire)	578,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9602 - Kab. Puncak Jaya)	2.576,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9603 - Kab. Paniai)	1.099,6	DAK

SK No 188252 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9604 - Kab. Mimika)	2.411,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9605 - Kab. Puncak)	5.297,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9606 - Kab. Dogiyai)	7.887,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9607 - Kab. Intan Jaya)	284,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9701 - Kab. Jayawijaya)	1.044,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9703 - Kab. Yahukimo)	4.282,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9704 - Kab. Tolikara)	5.268,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9705 - Kab. Mamberamo Tengah)	6.770,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9706 - Kab. Yalimo)	9.311,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9707 - Kab. Lanny Jaya)	7.115,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9801 - Kab. Sorong)	299,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9802 - Kab. Sorong Selatan)	2.472,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9804 - Kab. Tambrauw)	6.680,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9805 - Kab. Maybrat)	7.220,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (12 - Provinsi Sumatera Utara)	8.272,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1201 - Kab. Nias)	448,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1202 - Kab. Mandailing Natal)	2.798,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	2.436,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	871,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1206 - Kab. Toba)	2.773,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1208 - Kab. Asahan)	365,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1209 - Kab. Simalungun)	4.732,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1210 - Kab. Dairi)	792,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1212 - Kab. Deli Serdang)	644,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1213 - Kab. Langkat)	4.120,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1214 - Kab. Nias Selatan)	1.608,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1217 - Kab. Samosir)	357,8	DAK

SK No 188253 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	1.015,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	7.640,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1221 - Kab. Padang Lawas)	1.095,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	1.554,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1224 - Kab. Nias Utara)	7.914,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1225 - Kab. Nias Barat)	578,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1272 - Kota Tanjung Balai)	7.684,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1273 - Kota Pematang Siantar)	755,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1274 - Kota Tebing Tinggi)	799,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1277 - Kota Padangsidimpuan)	4.750,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1278 - Kota Gunungsitoli)	230,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (13 - Provinsi Sumatera Barat)	11.680,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	989,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	2.984,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1303 - Kab. Solok)	3.047,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1305 - Kab. Tanah Datar)	1.229,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1306 - Kab. Padang Pariaman)	1.493,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1308 - Kab. Lima Puluh Kota)	3.751,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1309 - Kab. Pasaman)	854,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1312 - Kab. Pasaman Barat)	1.128,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1371 - Kota Padang)	226,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1372 - Kota Solok)	2.425,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (14 - Provinsi Riau)	6.577,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	2.671,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	326,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1404 - Kab. Pelalawan)	983,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1406 - Kab. Kampar)	2.892,1	DAK

SK No 188254 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1407 - Kab. Rokan Hulu)	830,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1408 - Kab. Bengkalis)	3.058,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1409 - Kab. Rokan Hilir)	347,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1410 - Kab. Kepulauan Meranti)	409,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1471 - Kota Pekanbaru)	2.707,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1473 - Kota Dumai)	2.004,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (15 - Provinsi Jambi)	9.328,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1501 - Kab. Kerinci)	426,2	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1502 - Kab. Merangin)	2.308,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1504 - Kab. Batanghari)	3.036,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1505 - Kab. Muaro Jambi)	7.408,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	584,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	3.358,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1508 - Kab. Tebo)	2.015,6	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1571 - Kota Jambi)	667,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	1.900,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu)	1.709,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir)	930,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1603 - Kab. Muara Enim)	2.514,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1604 - Kab. Lahat)	2.388,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1606 - Kab. Musi Banyuasin)	2.819,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1607 - Kab. Banyuasin)	1.774,6	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)	1.677,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)	228,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1671 - Kota Palembang)	3.392,8	DAK	

SK No 188255 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1672 - Kota Prabumulih)	365,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (17 - Provinsi Bengkulu)	8.434,8	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	807,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1702 - Kab. Rejang Lebong)	2.736,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1703 - Kab. Bengkulu Utara)	3.448,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1704 - Kab. Kaur)	4.513,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1705 - Kab. Seluma)	501,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1706 - Kab. Mukomuko)	3.040,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1707 - Kab. Lebong)	1.307,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	975,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1771 - Kota Bengkulu)	3.068,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (18 - Provinsi Lampung)	7.884,5	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1801 - Kab. Lampung Barat)	512,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1802 - Kab. Tanggamus)	239,2	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1803 - Kab. Lampung Selatan)	253,4	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1804 - Kab. Lampung Timur)	2.972,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1805 - Kab. Lampung Tengah)	2.632,2	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1806 - Kab. Lampung Utara)	957,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1807 - Kab. Way Kanan)	2.171,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1808 - Kab. Tulang Bawang)	792,1	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1809 - Kab. Pesawaran)	792,3	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1812 - Kab. Tulang Bawang Barat)	528,0	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1813 - Kab. Pesisir Barat)	6.751,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1871 - Kota Bandar Lampung)	3.426,9	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1901 - Kab. Bangka)	2.505,7	DAK	
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1903 - Kab. Bangka Barat)	1.610,3	DAK	

SK No 188256 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1971 - Kota Pangkal Pinang)	399,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2101 - Kab. Karimun)	2.731,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2102 - Kab. Bintan)	875,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2103 - Kab. Natuna)	1.673,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	431,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2171 - Kota Batam)	2.880,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2172 - Kota Tanjung Pinang)	2.583,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (32 - Provinsi Jawa Barat)	8.391,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3201 - Kab. Bogor)	5.278,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3202 - Kab. Sukabumi)	2.642,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3203 - Kab. Cianjur)	2.556,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3204 - Kab. Bandung)	1.729,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3205 - Kab. Garut)	3.537,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3206 - Kab. Tasikmalaya)	1.670,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3207 - Kab. Ciamis)	797,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3208 - Kab. Kuningan)	1.346,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3209 - Kab. Cirebon)	2.813,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3210 - Kab. Majalengka)	241,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3211 - Kab. Sumedang)	2.443,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3212 - Kab. Indramayu)	1.570,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3213 - Kab. Subang)	790,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3215 - Kab. Karawang)	1.961,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3216 - Kab. Bekasi)	2.723,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3217 - Kab. Bandung Barat)	1.447,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3218 - Kab. Pangandaran)	1.981,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3272 - Kota Sukabumi)	2.167,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3273 - Kota Bandung)	2.333,9	DAK

SK No 188257 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3274 - Kota Cirebon)	230,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3275 - Kota Bekasi)	1.760,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3276 - Kota Depok)	3.134,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3278 - Kota Tasikmalaya)	1.052,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3279 - Kota Banjar)	778,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (33 - Provinsi Jawa Tengah)	38.705,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3301 - Kab. Cilacap)	1.608,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3302 - Kab. Banyumas)	2.053,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3303 - Kab. Purbalingga)	2.406,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3304 - Kab. Banjarnegara)	245,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3305 - Kab. Kebumen)	2.152,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3306 - Kab. Purworejo)	2.063,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3307 - Kab. Wonosobo)	2.433,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3308 - Kab. Magelang)	593,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3309 - Kab. Boyolali)	928,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3310 - Kab. Klaten)	2.653,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3312 - Kab. Wonogiri)	8.124,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3313 - Kab. Karanganyar)	678,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3315 - Kab. Grobogan)	449,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3316 - Kab. Blora)	2.054,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3319 - Kab. Kudus)	3.497,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3321 - Kab. Demak)	273,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3322 - Kab. Semarang)	8.690,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3324 - Kab. Kendal)	3.919,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3327 - Kab. Pemalang)	24.731,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3328 - Kab. Tegal)	12.404,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3329 - Kab. Brebes)	2.208,0	DAK

SK No 188258 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3372 - Kota Surakarta)	241,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3374 - Kota Semarang)	1.669,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3402 - Kab. Bantul)	770,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3403 - Kab. Gunungkidul)	1.020,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3471 - Kota Yogyakarta)	240,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (35 - Provinsi Jawa Timur)	17.290,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3503 - Kab. Trenggalek)	268,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3504 - Kab. Tulungagung)	2.485,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3506 - Kab. Kediri)	2.230,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3507 - Kab. Malang)	5.778,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3508 - Kab. Lumajang)	7.250,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3509 - Kab. Jember)	4.434,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3510 - Kab. Banyuwangi)	7.597,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3511 - Kab. Bondowoso)	2.214,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3513 - Kab. Probolinggo)	2.872,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3514 - Kab. Pasuruan)	1.113,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3515 - Kab. Sidoarjo)	1.520,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3516 - Kab. Mojokerto)	399,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3517 - Kab. Jombang)	1.700,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3520 - Kab. Magetan)	2.694,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3524 - Kab. Lamongan)	2.450,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3525 - Kab. Gresik)	5.261,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3526 - Kab. Bangkalan)	1.529,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3572 - Kota Blitar)	2.327,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3573 - Kota Malang)	351,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3578 - Kota Surabaya)	229,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (36 - Provinsi Banten)	3.796,0	DAK

SK No 188259 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3601 - Kab. Pandeglang)	5.081,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3602 - Kab. Lebak)	3.051,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3603 - Kab. Tangerang)	25.956,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3604 - Kab. Serang)	16.058,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3671 - Kota Tangerang)	323,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3672 - Kota Cilegon)	2.100,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3673 - Kota Serang)	499,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3674 - Kota Tangerang Selatan)	1.871,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (51 - Provinsi Bali)	5.307,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5102 - Kab. Tabanan)	2.550,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5104 - Kab. Gianyar)	2.086,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5108 - Kab. Buleleng)	2.294,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	32.004,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5201 - Kab. Lombok Barat)	2.732,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5202 - Kab. Lombok Tengah)	3.419,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5203 - Kab. Lombok Timur)	2.500,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	2.448,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5272 - Kota Bima)	11.376,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	2.163,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5302 - Kab. Sumba Timur)	2.216,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5303 - Kab. Kupang)	5.400,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	374,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5307 - Kab. Alor)	2.500,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5308 - Kab. Lembata)	581,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5310 - Kab. Sikka)	453,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5312 - Kab. Ngada)	3.091,3	DAK

SK No 188260 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5313 - Kab. Manggarai)	454,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5315 - Kab. Manggarai Barat)	2.273,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5319 - Kab. Manggarai Timur)	653,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5371 - Kota Kupang)	1.790,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	8.451,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6102 - Kab. Bengkayang)	549,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6103 - Kab. Landak)	201,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6104 - Kab. Mempawah)	2.706,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6105 - Kab. Sanggau)	1.027,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6106 - Kab. Ketapang)	1.842,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6107 - Kab. Sintang)	2.318,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	2.589,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6111 - Kab. Kayong Utara)	3.286,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6112 - Kab. Kubu Raya)	482,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6171 - Kota Pontianak)	226,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6172 - Kota Singkawang)	1.691,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	11.970,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6201 - Kab. Kotawaringin Barat)	2.481,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6202 - Kab. Kotawaringin Timur)	5.102,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6204 - Kab. Barito Selatan)	3.103,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6208 - Kab. Seruyan)	4.891,4	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6209 - Kab. Katingan)	2.388,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6211 - Kab. Gunung Mas)	699,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6213 - Kab. Murung Raya)	2.410,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	30.969,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6301 - Kab. Tanah Laut)	5.526,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6303 - Kab. Banjar)	260,7	DAK

SK No 188261 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6304 - Kab. Barito Kuala)	834,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	1.086,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6309 - Kab. Tabalong)	284,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6311 - Kab. Balangan)	531,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6371 - Kota Banjarmasin)	1.726,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6372 - Kota Banjarbaru)	268,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	13.912,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6401 - Kab. Paser)	2.171,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6402 - Kab. Kutai Barat)	213,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	1.562,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6471 - Kota Balikpapan)	270,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (65 - Provinsi Kalimantan Utara)	4.962,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6502 - Kab. Bulungan)	2.756,3	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6504 - Kab. Nunukan)	1.577,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	12.313,2	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7104 - Kab. Kepulauan Talaud)	7.701,0	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	10.127,1	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7108 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro)	3.811,9	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7109 - Kab. Minahasa Tenggara)	4.840,6	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	6.802,7	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur)	664,8	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7171 - Kota Manado)	873,5	DAK
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	4.239,7	DAK
Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	1.856,0	KEMENTERIAN AGAMA
Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	91.960,0	KEMENTERIAN AGAMA
Bimbingan Keluarga Kristiani	6.071,4	KEMENTERIAN AGAMA
Bimbingan Keluarga Sukinah	4.938,9	KEMENTERIAN AGAMA

SK No 188262 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	10.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	5.500,0	KEMENTERIAN AGAMA
Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *stunting*	600,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi *Stunting*	450,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	35.180,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Promosi dan Penyebarluasan Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan [LP - 4]	3.261,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock* [LP - 4]	25.377,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia (LP)	210.762,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	5.506,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
NSPK Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	1.714,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	25.662,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	5.429,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Baru Lahir [LP - 7]	4.579,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	10.633,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Non Medik (IsDB) - LR	101.231,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi	3.731,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi	1.441,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Imunisasi	4.074,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Logistik Penanggulangan PD3I	8.359,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Bidang Imunisasi	5.021,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Imunisasi	5.973,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin Dan KB (LP-7)	2.675,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Germas Bersama Mitra Potensial (LP-3)	18.900,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi dalam mendukung Germas dan Kesehatan Prioritas (LP-3)	1.386,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kemitraan Potensial dalam mendukung Germas dan Kesehatan Prioritas (LP-3)	1.333,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Produksi dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Germas Melalui Berbagai Media (LP-3)	32.974,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka germas di berbagai tatanan (LP-3)	4.525,6	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188263 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu (LP-1)	1.864,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis Pelayanan KIA (IsDB) - LR	2.124,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	21.291,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	18.407,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	9.077,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Revitalisasi Posyandu (LP-1)	1.088,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan pelayanan KIA (IsDB) - LR	1.920,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kampanye Pencegahan *Stunting* Melalui Berbagai Media (LP-4)	5.040,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Terkait Perbaikan Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	2.088,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
NSPK Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	1.616,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock* [LP - 4]	14.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	7.041,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita [LP - 4]	6.504,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	5.339,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pemantauan Wilayah dengan Pendekatan Keluarga (LP-1)	2.264,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro [LP - 4]	13.050,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja [LP - 4]	1.994,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja [LP - 4]	1.646,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja [LP - 4]	1.483,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kampanye Posyandu Aktif (LP-1)	8.346,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bayi baru lahir yang mendapat skrining hipotiroid kongenital (SHK) [LP - 7]	69.830,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bimtek, monev, Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi	6.259,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Germas Bersama Mitra Potensial (LP-3)	7.683,8	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188264 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Kegiatan *Surveilans* Gizi dan KIA [LP - 7]	2.536,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Jumlah Orang yang Disosialisasi Pelayanan Kespro Bagi Disabilitas (LP-7)	1.100,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait *Surveilans* gizi dan KIA [LP - 7]	3.232,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Germas Bersama Mitra Potensial [LP - 3]	7.683,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi Terkait *Surveilans* Gizi dan KIA (LP - 7)	7.225,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait *Surveilans* gizi dan KIA (LP - 7)	5.967,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan layanan prioritas Kesehatan Ibu dan Anak di rumah sakit	1.443,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Dinkes Kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terkait Kompetensi Dasar Posyandu (LP-1)	4.218,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan *Stunting* (SDM)	11.329,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Diseminasi Informasi mengenai *Stunting*	15.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	544.111,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (*Stunting*)	840,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON	1.546,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kajian dan Pengembangan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON	1.837,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD yang Menerapkan Model Pembelajaran Bidang PAUD dan *Parenting*	1.097,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Melaksanakan Program UKS	3.705,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	31.666,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	13.374,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SD yang Melaksanakan Program UKS	14.529,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMP yang Melaksanakan Program UKS	10.164,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
19) MP: Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)	**102.730,0**	
SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN) - Pusat	73.152,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Kab. Bogor	29.577,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
20) MP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	**270.340,1**	
Transformasi BLK	71.502,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Layanan Perantaraan Kerja	12.800,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SK No 188265 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja	16.020,5	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	2.108,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri	2.126,6	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	84.800,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	4.250,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	4.520,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	72.212,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
21) MP: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	**171.519.142,7**	
Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	16.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	16.550,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	1.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Pemetaan Risiko Bencana	1.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Bantuan Peralatan / Sarana	5.250,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Distribusi Logistik dan Peralatan PB	1.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Pemberdayaan PMI purna dan keluarganya	12.139,7	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
Pemberdayaan PMI purna dan keluarganya	26.992,5	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
Peradilan Yang Fair (*Fair Trial*) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum	1.939,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	10.569,2	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MI Penerima PIP	422.823,2	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	11.449,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	93.574,8	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa penerima PIP Kuliah	41.560,2	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTKB Penerima KIP Kuliah	11.721,6	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	558.814,5	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMPTK Penerima PIP	3.571,5	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	69.399,8	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	45.571,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MA Penerima PIP	320.372,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SDTK Penerima PIP	1.193,4	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	10.111,2	KEMENTERIAN AGAMA

SK No 188266 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	2.400,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	947.925,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMAK Penerima PIP	3.045,0	KEMENTERIAN AGAMA
Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK Nasional	12.405,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	33.445,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pendampingan Desa	1.506.080,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	2.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	60.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama	4.762,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang dibangun	3.307,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	1.763,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Prasarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Tertinggal	2.685,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	19.383,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sarana Pelayanan Dasar yang dibangun/dikembangkan/direhabilitasi	1.158,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	559,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	205.745,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	3.275,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	46.464.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	2.500.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas Kesehatan Lansia Dan Implementasi Standar Pelayanan Geriatri Yang Berkualitas (LP)	1.411,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Jumlah Orang yang Disosialisasi Pelayanan Kespro Bagi Disabilitas (LP)	1.100,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Produktif dan Lansia (LP)	5.772,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Transformasi BLK	71.502,4	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan	45.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Tenaga Kerja Mandiri Pemula	180.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	20.797,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SK No 188267 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.961,8	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Edukasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Petugas Pelayanan	3.401,2	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem)	40.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Perluasan Cakupan Penyaluran Melalui Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMi (PN)	1.454,7	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Center Nasional	1.144.938,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Literasi Digital	450.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	7.486,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	244.537,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	460.411,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan SPAM Regional	962.294,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.672.874,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	138.614,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	56.814,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	258.894,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Regional	962.032,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	544.111,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	202.125,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1.200.002,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	698.630,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	622.658,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	95.649,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.223.762,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	13.994.381,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.726.502,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7.799,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	3.234.559,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SK No 188268 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	3.307.096,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	252.935,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	20.250,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Hijauan Pakan Ternak	6.350,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Benih Ternak Unggul	64.413,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lahan Pertanian Pangan Produktif	41.627,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Pertanian	160.165,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Wirausahawan Muda Pertanian	5.915,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Area penyaluran benih padi	353.229,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	23.280,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Bibit Ternak Unggul	93.170,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Embung Pertanian	90.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan	114.280,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Usaha Ternak	27.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Area penyaluran benih jagung	229.734,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*)	71.130,4	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Ternak Unggas dan Aneka Ternak	61.041,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Kayu	11.243,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kacang Tanah	1.714,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Padi	592.443,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Jagung	223.402,5	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	305.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	150.150,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	9.374,8	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	14.196,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Sumber Daya Manusia yang dikelola	1.153.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	87.400,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	4.095,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	6.465,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	411.518,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)	5.850,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas)	3.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	4.370,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti proses akreditasi	6.469,2	KEMENTERIAN SOSIAL
SDM Kesos yang telah mengikuti sertifikasi	10.161,6	KEMENTERIAN SOSIAL

SK No 188269 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	1.916,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	701.817,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia)	5.850,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia)	3.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	582.977,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	5.663,7	KEMENTERIAN SOSIAL
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	5.530,5	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	4.236,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Warga KAT Yang diberdayakan	46.185,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha	50.711,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	336.591,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan *Command Center*	1.869,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan SLRT	1.869,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	21.500,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana	6.291,6	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	1.944,8	KEMENTERIAN SOSIAL
Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	50.762,5	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	4.022,4	KEMENTERIAN SOSIAL
Pengasuhan Alternatif (adopsi *single parent* dan *Inter country*)	1.728,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana	12.827,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.586,5	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	43.239,7	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana	89.329,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	4.052,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial	6.589,2	KEMENTERIAN SOSIAL
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.735.317,1	KEMENTERIAN SOSIAL

SK No 188270 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
22) MP: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	**22.589.342,7**	
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	30.577,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*	88.122,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22.755,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8.154,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*	151.482,9	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	6.307,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	4.109,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	1.122,4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	5.875,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.074,9	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Fasilitas produksi produk JKN dan produk *high risk* lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	3.026,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	8.279,9	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	11.215,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	10.897,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*	2.155,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	2.176,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	6.609,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	12.605,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	21.703,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang *Real time*, dikembangkan dan terintegrasi	25.927,4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	1.527,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practices* (GLP)	2.952,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	39.682,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Penguatan Sistem Kesehatan (3577 - Kota Madiun)	460,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3578 - Kota Surabaya)	2.225,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3579 - Kota Batu)	723,9	DAK

SK No 188271 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (36 - Provinsi Banten)	5.225,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3601 - Kab. Pandeglang)	25.695,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3602 - Kab. Lebak)	16.025,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3603 - Kab. Tangerang)	4.707,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3604 - Kab. Serang)	11.877,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3671 - Kota Tangerang)	10.230,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3672 - Kota Cilegon)	1.499,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3673 - Kota Serang)	4.764,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3674 - Kota Tangerang Selatan)	6.883,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (51 - Provinsi Bali)	4.275,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5101 - Kab. Jembrana)	2.688,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5102 - Kab. Tabanan)	6.053,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5103 - Kab. Badung)	4.484,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5104 - Kab. Gianyar)	12.228,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5105 - Kab. Klungkung)	6.564,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5106 - Kab. Bangli)	22.292,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5107 - Kab. Karangasem)	14.279,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5108 - Kab. Buleleng)	6.192,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5171 - Kota Denpasar)	10.106,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	45.450,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5201 - Kab. Lombok Barat)	20.696,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5202 - Kab. Lombok Tengah)	53.000,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5203 - Kab. Lombok Timur)	25.998,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5204 - Kab. Sumbawa)	46.953,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5205 - Kab. Dompu)	5.466,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5206 - Kab. Bima)	10.734,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	40.897,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5208 - Kab. Lombok Utara)	9.097,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5271 - Kota Mataram)	43.943,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5272 - Kota Bima)	8.236,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	24.158,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5301 - Kab. Sumba Barat)	57.855,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5302 - Kab. Sumba Timur)	10.595,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5303 - Kab. Kupang)	79.846,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	18.584,0	DAK	

SK No 188272 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	6.814,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5306 - Kab. Belu)	43.397,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5307 - Kab. Alor)	22.846,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5308 - Kab. Lembata)	15.469,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5309 - Kab. Flores Timur)	78.189,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5310 - Kab. Sikka)	5.324,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5311 - Kab. Ende)	26.659,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5312 - Kab. Ngada)	129.666,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5313 - Kab. Manggarai)	22.312,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5314 - Kab. Rote Ndao)	15.342,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5315 - Kab. Manggarai Barat)	37.097,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5316 - Kab. Sumba Tengah)	9.696,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	14.478,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5318 - Kab. Nagekeo)	6.858,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5319 - Kab. Manggarai Timur)	88.702,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5320 - Kab. Sabu Raijua)	11.500,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5321 - Kab. Malaka)	15.219,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (5371 - Kota Kupang)	13.623,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (61 - Provinsi Kalimantan Barat)	3.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6101 - Kab. Sambas)	85.038,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6102 - Kab. Bengkayang)	21.587,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6103 - Kab. Landak)	15.412,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6104 - Kab. Mempawah)	5.917,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6105 - Kab. Sanggau)	7.484,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6106 - Kab. Ketapang)	10.017,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6107 - Kab. Sintang)	11.851,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	5.502,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6109 - Kab. Sekadau)	3.230,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6110 - Kab. Melawi)	13.317,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6111 - Kab. Kayong Utara)	13.280,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6112 - Kab. Kubu Raya)	22.256,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6171 - Kota Pontianak)	28.359,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6172 - Kota Singkawang)	6.592,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (62 - Provinsi Kalimantan Tengah)	16.951,6	DAK	

SK No 188273 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (6201 - Kab. Kotawaringin Barat)	26.580,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6202 - Kab. Kotawaringin Timur)	58.186,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6203 - Kab. Kapuas)	11.981,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6204 - Kab. Barito Selatan)	8.119,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6205 - Kab. Barito Utara)	3.654,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6206 - Kab. Sukamara)	37.867,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6207 - Kab. Lamandau)	9.580,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6208 - Kab. Seruyan)	9.610,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6209 - Kab. Katingan)	142.688,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6210 - Kab. Pulang Pisau)	20.858,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6211 - Kab. Gunung Mas)	5.587,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6212 - Kab. Barito Timur)	4.427,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6213 - Kab. Murung Raya)	8.943,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6271 - Kota Palangkaraya)	4.794,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	19.152,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6301 - Kab. Tanah Laut)	18.389,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6302 - Kab. Kotabaru)	6.660,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6303 - Kab. Banjar)	11.192,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6304 - Kab. Barito Kuala)	8.585,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6305 - Kab. Tapin)	6.365,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	38.139,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah)	48.672,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	4.108,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6309 - Kab. Tabalong)	1.956,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	6.617,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6311 - Kab. Balangan)	6.602,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6371 - Kota Banjarmasin)	11.526,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6372 - Kota Banjarbaru)	22.950,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6401 - Kab. Paser)	22.270,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6402 - Kab. Kutai Barat)	3.157,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	31.538,0	DAK	

SK No 188274 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (6404 - Kab. Kutai Timur)	10.162,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6405 - Kab. Berau)	3.820,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	126.892,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6411 - Kab. Mahakam Ulu)	18.968,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6471 - Kota Balikpapan)	3.391,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6472 - Kota Samarinda)	8.340,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (65 - Provinsi Kalimantan Utara)	1.425,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6501 - Kab. Malinau)	11.898,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6502 - Kab. Bulungan)	8.929,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6503 - Kab. Tana Tidung)	4.194,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6504 - Kab. Nunukan)	40.960,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (6571 - Kota Tarakan)	4.158,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	51.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	18.504,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7102 - Kab. Minahasa)	7.816,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe)	108.877,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7104 - Kab. Kepulauan Talaud)	6.830,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	23.730,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7106 - Kab. Minahasa Utara)	51.039,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara)	3.590,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7108 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro)	5.867,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7109 - Kab. Minahasa Tenggara)	31.759,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	3.120,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur)	6.316,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7171 - Kota Manado)	46.682,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7172 - Kota Bitung)	33.585,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1105 - Kab. Aceh Timur)	8.200,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1106 - Kab. Aceh Tengah)	40.305,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1107 - Kab. Aceh Barat)	16.043,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1108 - Kab. Aceh Besar)	39.596,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1109 - Kab. Pidie)	25.364,0	DAK	

SK No 188275 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1110 - Kab. Bireuen)	27.304,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1111 - Kab. Aceh Utara)	19.011,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	10.125,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	49.411,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1115 - Kab. Nagan Raya)	30.196,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1116 - Kab. Aceh Jaya)	23.073,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1117 - Kab. Bener Meriah)	22.814,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1118 - Kab. Pidie Jaya)	6.028,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1171 - Kota Banda Aceh)	38.043,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1172 - Kota Sabang)	19.638,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1173 - Kota Langsa)	31.801,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1175 - Kota Subulussalam)	15.076,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (12 - Provinsi Sumatera Utara)	51.163,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1201 - Kab. Nias)	4.413,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1202 - Kab. Mandailing Natal)	75.285,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	47.769,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	26.205,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	4.801,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1206 - Kab. Toba)	59.763,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1207 - Kab. Labuhanbatu)	46.457,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1208 - Kab. Asahan)	8.842,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1209 - Kab. Simalungun)	39.354,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1210 - Kab. Dairi)	3.903,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1211 - Kab. Karo)	2.615,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1212 - Kab. Deli Serdang)	14.243,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1213 - Kab. Langkat)	10.201,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1214 - Kab. Nias Selatan)	18.325,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	4.964,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	7.911,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1217 - Kab. Samosir)	32.272,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	1.849,6	DAK	

SK No 188276 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1219 - Kab. Batu Bara)	10.963,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	25.644,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1221 - Kab. Padang Lawas)	10.366,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	2.188,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	3.072,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1224 - Kab. Nias Utara)	16.578,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1225 - Kab. Nias Barat)	17.197,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1271 - Kota Sibolga)	28.747,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1272 - Kota Tanjung Balai)	3.137,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1273 - Kota Pematang Siantar)	5.278,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1274 - Kota Tebing Tinggi)	471,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1275 - Kota Medan)	12.236,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1276 - Kota Binjai)	2.944,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1277 - Kota Padangsidimpuan)	19.284,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1278 - Kota Gunungsitoli)	4.227,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (13 - Provinsi Sumatera Barat)	7.500,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	7.855,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	34.251,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1303 - Kab. Solok)	12.566,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1304 - Kab. Sijunjung)	7.723,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1305 - Kab. Tanah Datar)	2.874,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1306 - Kab. Padang Pariaman)	6.067,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1307 - Kab. Agam)	11.298,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1308 - Kab. Lima Puluh Kota)	10.431,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1309 - Kab. Pasaman)	3.132,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1310 - Kab. Solok Selatan)	17.285,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1311 - Kab. Dharmasraya)	13.460,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1312 - Kab. Pasaman Barat)	1.732,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1371 - Kota Padang)	3.134,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1372 - Kota Solok)	2.443,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1373 - Kota Sawahlunto)	31.170,8	DAK	

SK No 188277 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1374 - Kota Padang Panjang)	15.554,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1375 - Kota Bukit Tinggi)	22.419,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1376 - Kota Payakumbuh)	1.736,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1377 - Kota Pariaman)	26.958,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (14 - Provinsi Riau)	16.744,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1401 - Kab. Kuantan Singingi)	1.977,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	6.147,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	14.792,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1406 - Kab. Kampar)	10.016,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1407 - Kab. Rokan Hulu)	2.299,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1408 - Kab. Bengkalis)	10.816,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1409 - Kab. Rokan Hilir)	13.845,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1410 - Kab. Kepulauan Meranti)	80.922,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1471 - Kota Pekanbaru)	48.934,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1473 - Kota Dumai)	3.253,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (15 - Provinsi Jambi)	2.850,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1501 - Kab. Kerinci)	6.290,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1502 - Kab. Merangin)	9.662,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1503 - Kab. Sarolangun)	17.341,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1504 - Kab. Batanghari)	10.914,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1505 - Kab. Muaro Jambi)	33.356,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	11.225,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	17.963,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1508 - Kab. Tebo)	6.155,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1509 - Kab. Bungo)	15.681,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1571 - Kota Jambi)	14.658,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1572 - Kota Sungai Penuh)	19.831,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (16 - Provinsi Sumatera Selatan)	10.307,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu)	6.035,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir)	6.270,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1603 - Kab. Muara Enim)	7.762,6	DAK	

SK No 188278 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1604 - Kab. Lahat)	5.719,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1605 - Kab. Musi Rawas)	28.397,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1606 - Kab. Musi Banyuasin)	53.645,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1607 - Kab. Banyuasin)	52.064,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)	46.134,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	7.531,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1610 - Kab. Ogan Ilir)	15.086,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1611 - Kab. Empat Lawang)	35.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1613 - Kab. Musi Rawas Utara)	3.306,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1671 - Kota Palembang)	8.184,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1672 – Kota Prabumulih)	10.785,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1674 - Kota Lubuk Linggau)	14.587,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (17 - Provinsi Bengkulu)	10.900,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	4.997,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1702 - Kab. Rejang Lebong)	22.239,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1703 - Kab. Bengkulu Utara)	24.808,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1704 - Kab. Kaur)	75.548,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1705 - Kab. Seluma)	45.403,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1706 - Kab. Mukomuko)	39.483,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1707 - Kab. Lebong)	19.627,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1708 - Kab. Kepahiang)	32.477,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	5.707,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1771 - Kota Bengkulu)	48.018,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (18 - Provinsi Lampung)	4.500,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1801 - Kab. Lampung Barat)	5.012,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1802 - Kab. Tanggamus)	20.824,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1803 - Kab. Lampung Selatan)	15.287,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1804 - Kab. Lampung Timur)	3.856,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1805 - Kab. Lampung Tengah)	8.936,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1904 - Kab. Bangka Tengah)	8.141,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1905 - Kab. Bangka Selatan)	14.775,1	DAK	

SK No 188279 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (1906 - Kab. Belitung Timur)	2.890,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (1971 - Kota Pangkal Pinang)	70.031,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (21 – Provinsi Kepulauan Riau)	3.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2101 - Kab. Karimun)	827,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2102 - Kab. Bintan)	5.648,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2103 - Kab. Natuna)	21.685,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2104 - Kab. Lingga)	11.711,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	43.139,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2171 - Kota Batam)	7.839,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (2172 - Kota Tanjung Pinang)	2.000,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (32 - Provinsi Jawa Barat)	13.615,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3201 - Kab. Bogor)	14.872,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3202 - Kab. Sukabumi)	48.718,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3203 - Kab. Cianjur)	34.059,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3204 - Kab. Bandung)	68.202,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3205 - Kab. Garut)	20.465,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3206 - Kab. Tasikmalaya)	13.373,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3207 - Kab. Ciamis)	9.131,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3208 - Kab. Kuningan)	8.213,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3209 - Kab. Cirebon)	10.520,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3210 - Kab. Majalengka)	43.049,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3211 - Kab. Sumedang)	21.376,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3212 - Kab. Indramayu)	33.154,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3213 - Kab. Subang)	10.142,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3214 - Kab. Purwakarta)	28.171,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3215 - Kab. Karawang)	11.752,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3216 - Kab. Bekasi)	60.723,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3217 - Kab. Bandung Barat)	9.063,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3218 - Kab. Pangandaran)	6.757,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3271 - Kota Bogor)	33.245,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3272 - Kota Sukabumi)	4.596,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3274 - Kota Cirebon)	11.529,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3275 - Kota Bekasi)	29.926,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3276 - Kota Depok)	17.533,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3277 - Kota Cimahi)	1.500,0	DAK	

SK No 188280 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3278 - Kota Tasikmalaya)	16.049,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3279 - Kota Banjar)	9.250,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (33 - Provinsi Jawa Tengah)	4.500,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3301 - Kab. Cilacap)	26.602,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3302 - Kab. Banyumas)	79.301,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3303 - Kab. Purbalingga)	5.214,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3304 - Kab. Banjarnegara)	10.581,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3305 - Kab. Kebumen)	7.306,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3306 - Kab. Purworejo)	13.032,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3307 - Kab. Wonosobo)	3.333,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3308 - Kab. Magelang)	60.402,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3309 - Kab. Boyolali)	7.410,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3310 - Kab. Klaten)	3.912,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3311 - Kab. Sukoharjo)	11.757,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3312 - Kab. Wonogiri)	20.053,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3313 - Kab. Karanganyar)	6.969,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3314 - Kab. Sragen)	17.533,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3315 - Kab. Grobogan)	24.424,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3316 - Kab. Blora)	48.166,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3317 - Kab. Rembang)	17.574,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3318 - Kab. Pati)	7.319,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3319 - Kab. Kudus)	1.574,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3320 - Kab. Jepara)	12.873,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3321 - Kab. Demak)	20.960,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3322 - Kab. Semarang)	15.564,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3323 - Kab. Temanggung)	4.316,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3324 - Kab. Kendal)	4.238,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3325 - Kab. Batang)	18.607,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3326 - Kab. Pekalongan)	102.372,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3327 - Kab. Pemalang)	22.533,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3328 - Kab. Tegal)	13.678,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3329 - Kab. Brebes)	48.795,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3371 - Kota Magelang)	28.222,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3372 - Kota Surakarta)	1.900,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3373 - Kota Salatiga)	1.500,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3374 - Kota Semarang)	3.784,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3375 - Kota Pekalongan)	5.488,2	DAK	

SK No 188281 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3376 - Kota Tegal)	2.739,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (34 - Provinsi DI Yogyakarta)	3.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3401 - Kab. Kulon Progo)	36.726,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3402 - Kab. Bantul)	53.206,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3403 - Kab. Gunungkidul)	20.107,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3404 - Kab. Sleman)	8.620,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3471 - Kota Yogyakarta)	37.653,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (35 - Provinsi Jawa Timur)	80.971,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3501 - Kab. Pacitan)	1.319,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3502 - Kab. Ponorogo)	853,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3503 - Kab. Trenggalek)	5.317,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3504 - Kab. Tulungagung)	49.975,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3505 - Kab. Blitar)	3.327,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3506 - Kab. Kediri)	3.000,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3507 - Kab. Malang)	29.887,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3508 - Kab. Lumajang)	23.342,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3509 - Kab. Jember)	6.830,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3510 - Kab. Banyuwangi)	1.187,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3511 - Kab. Bondowoso)	2.615,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3512 - Kab. Situbondo)	4.382,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3513 - Kab. Probolinggo)	11.734,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3514 - Kab. Pasuruan)	3.281,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3515 - Kab. Sidoarjo)	26.722,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3517 - Kab. Jombang)	6.056,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3518 - Kab. Nganjuk)	5.371,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3519 - Kab. Madiun)	32.670,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3520 - Kab. Magetan)	12.159,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3521 - Kab. Ngawi)	3.589,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3523 - Kab. Tuban)	26.138,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3524 - Kab. Lamongan)	45.919,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3525 - Kab. Gresik)	27.098,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3526 - Kab. Bangkalan)	14.460,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3527 - Kab. Sampang)	14.428,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3528 - Kab. Pamekasan)	6.592,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3529 - Kab. Sumenep)	62.198,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (3571 - Kota Kediri)	2.690,8	DAK	

SK No 188282 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (3572 - Kota Blitar)	513,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3573 - Kota Malang)	3.137,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3574 - Kota Probolinggo)	1.500,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3575 - Kota Pasuruan)	12.000,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (3576 - Kota Mojokerto)	1.425,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7173 - Kota Tomohon)	38.876,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7174 - Kota Kotamobagu)	6.791,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (72 - Provinsi Sulawesi Tengah)	3.000,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7201 - Kab. Banggai Kepulauan)	30.351,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7202 - Kab. Banggai)	17.476,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7203 - Kab. Morowali)	4.753,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7204 - Kab. Poso)	19.218,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7205 - Kab. Donggala)	26.996,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7206 - Kab. Toli Toli)	38.384,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7207 - Kab. Buol)	45.087,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7208 - Kab. Parigi Moutong)	41.417,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7209 - Kab. Tojo Una Una)	6.479,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7210 - Kab. Sigi)	15.230,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7211 - Kab. Banggai Laut)	31.383,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1806 - Kab. Lampung Utara)	1.425,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1807 - Kab. Way Kanan)	6.884,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1808 - Kab. Tulang Bawang)	7.696,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1809 - Kab. Pesawaran)	10.485,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1810 - Kab. Pringsewu)	3.410,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1811 - Kab. Mesuji)	114.932,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1812 - Kab. Tulang Bawang Barat)	3.770,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1813 - Kab. Pesisir Barat)	2.006,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1871 - Kota Bandar Lampung)	16.493,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1872 - Kota Metro)	21.523,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	14.000,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1901 - Kab. Bangka)	35.532,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1902 - Kab. Belitung)	6.268,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1903 - Kab. Bangka Barat)	4.837,0	DAK

SK No 188283 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (7212 - Kab. Morowali Utara)	19.539,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7271 - Kota Palu)	22.771,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	21.499,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7301 - Kab. Kepulauan Selayar)	23.945,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7302 - Kab. Bulukumba)	37.176,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7303 - Kab. Bantaeng)	51.826,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7304 - Kab. Jeneponto)	78.332,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7305 - Kab. Takalar)	21.281,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7306 - Kab. Gowa)	37.796,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7307 - Kab. Sinjai)	7.691,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7308 - Kab. Maros)	42.900,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	62.164,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7310 - Kab. Barru)	15.872,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7311 - Kab. Bone)	28.941,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7312 - Kab. Soppeng)	5.334,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7313 - Kab. Wajo)	78.526,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	8.536,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7315 - Kab. Pinrang)	62.965,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7316 - Kab. Enrekang)	59.270,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7317 - Kab. Luwu)	38.075,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7318 - Kab. Tana Toraja)	44.007,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7322 - Kab. Luwu Utara)	27.075,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7325 - Kab. Luwu Timur)	19.698,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7326 - Kab. Toraja Utara)	55.291,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7371 - Kota Makassar)	35.720,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7372 - Kota Pare Pare)	23.473,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7373 - Kota Palopo)	3.062,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara)	8.980,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7401 - Kab. Buton)	24.127,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7402 - Kab. Muna)	17.875,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7403 - Kab. Konawe)	19.441,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7404 - Kab. Kolaka)	7.409,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7405 - Kab. Konawe Selatan)	18.332,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7406 - Kab. Bombana)	3.652,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (7407 - Kab. Wakatobi)	29.759,4	DAK

SK No 188284 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (7408 - Kab. Kolaka Utara)	31.197,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7409 - Kab. Buton Utara)	40.253,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7410 - Kab. Konawe Utara)	54.664,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	47.781,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7413 - Kab. Muna Barat)	19.240,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7414 - Kab. Buton Tengah)	2.243,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7415 - Kab. Buton Selatan)	8.469,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7471 - Kota Kendari)	4.150,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7472 - Kota Bau Bau)	8.597,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (75 - Provinsi Gorontalo)	76.268,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7501 - Kab. Boalemo)	15.202,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7502 - Kab. Gorontalo)	18.286,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7503 - Kab. Pohuwato)	35.781,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7504 - Kab. Bone Bolango)	23.998,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7505 - Kab. Gorontalo Utara)	5.046,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7571 - Kota Gorontalo)	5.802,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (76 - Provinsi Sulawesi Barat)	4.800,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7601 - Kab. Majene)	5.737,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7602 - Kab. Polewali Mandar)	27.963,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7603 - Kab. Mamasa)	14.131,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7604 - Kab. Mamuju)	12.241,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7605 - Kab. Pasangkayu)	28.107,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	39.627,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (81 - Provinsi Maluku)	17.065,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8101 - Kab. Kepulauan Tanimbar)	18.139,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	11.235,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8103 - Kab. Maluku Tengah)	34.556,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8104 - Kab. Buru)	24.772,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8105 - Kab. Kepulauan Aru)	5.326,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8106 - Kab. Seram Bagian Barat)	6.677,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8107 - Kab. Seram Bagian Timur)	7.176,5	DAK	

SK No 188285 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (8108 - Kab. Maluku Barat Daya)	3.447,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8109 - Kab. Buru Selatan)	44.358,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8171 - Kota Ambon)	4.319,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8172 - Kota Tual)	12.478,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (82 - Provinsi Maluku Utara)	27.937,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8201 - Kab. Halmahera Barat)	77.409,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8202 - Kab. Halmahera Tengah)	14.372,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8203 - Kab. Kepulauan Sula)	53.542,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	34.731,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8205 - Kab. Halmahera Utara)	25.845,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8206 - Kab. Halmahera Timur)	10.049,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8207 - Kab. Pulau Morotai)	11.961,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8208 - Kab. Pulau Taliabu)	4.074,2	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8271 - Kota Ternate)	5.748,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	5.019,3	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (91 - Provinsi Papua Barat)	3.800,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9101 - Kab. Fak Fak)	119.207,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9102 - Kab. Kaimana)	17.680,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9103 - Kab. Teluk Wondama)	6.826,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9104 - Kab. Teluk Bintuni)	3.800,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9105 - Kab. Manokwari)	15.467,8	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9111 - Kab. Manokwari Selatan)	24.171,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9112 - Kab. Pegunungan Arfak)	2.080,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (94 - Provinsi Papua)	15.500,0	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9403 - Kab. Jayapura)	8.083,1	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	10.481,5	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9409 - Kab. Biak Numfor)	32.860,9	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9419 - Kab. Sarmi)	8.927,6	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9420 - Kab. Keerom)	14.178,4	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9426 - Kab. Waropen)	7.163,7	DAK	
Penguatan Sistem Kesehatan (9427 - Kab. Supiori)	9.611,0	DAK	

SK No 188286 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penguatan Sistem Kesehatan (9428 - Kab. Mamberamo Raya)	11.346,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9471 - Kota Jayapura)	26.057,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9501 - Kab. Merauke)	44.511,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9502 - Kab. Boven Digoel)	29.532,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9503 - Kab. Mappi)	19.337,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9504 - Kab. Asmat)	25.132,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9601 - Kab. Nabire)	31.671,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9602 - Kab. Puncak Jaya)	63.797,7	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9603 - Kab. Paniai)	5.540,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9604 - Kab. Mimika)	13.701,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9605 - Kab. Puncak)	88.388,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9606 - Kab. Dogiyai)	18.130,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9607 - Kab. Intan Jaya)	1.789,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9608 - Kab. Deiyai)	23.930,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9701 - Kab. Jayawijaya)	93.470,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9702 - Kab. Pegunungan Bintang)	99.453,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9703 - Kab. Yahukimo)	81.450,5	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9704 - Kab. Tolikara)	240.425,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9705 - Kab. Mamberamo Tengah)	7.919,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9706 - Kab. Yalimo)	8.522,1	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9707 - Kab. Lanny Jaya)	187.195,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9708 - Kab. Nduga)	166.457,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9801 - Kab. Sorong)	37.905,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9802 - Kab. Sorong Selatan)	11.414,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9803 - Kab. Raja Ampat)	11.977,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9804 - Kab. Tambrauw)	91.740,3	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9805 - Kab. Maybrat)	7.129,8	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (9806 - Kota Sorong)	36.352,4	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (11 - Provinsi Aceh)	24.574,2	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1101 - Kab. Simeulue)	6.465,0	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1102 - Kab. Aceh Singkil)	6.229,9	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1103 - Kab. Aceh Selatan)	33.947,6	DAK
Penguatan Sistem Kesehatan (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	7.200,0	DAK
Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur (rujukan)	810.673,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM)	16.719,1	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188287 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Perencanaan Pengadaan Formasi ASN Nakes (SDM)	2.955,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi *Surveilans* dan Respons KLB/Wabah (HS)	5.089,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	59.936,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan kesehatan (HS)	14.809,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Germas Di Berbagai Tatanan (LP-3)	9.408,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penyusunan NSPK Manajemen Puskesmas dan BLUD (LP-1)	1.208,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (IsDB) (LR)	40.953,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM)	26.756,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan dan Monev Manajemen Puskesmas dan BLUD (LP-1)	1.440,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Manajemen Puskesmas dan BLUD (LP-1)	1.706,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	1.691,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS)	8.419,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan (TK)	2.265,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Faktor Risiko PTM (LP)	8.905,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP)	1.184,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, monitoring pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	7.723,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 Melalui Uji Klinis Vaksin Merah Putih (Inavac) (RF)	23.574,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP-1)	7.763,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Revitalisasi Posyandu (LP-1)	1.088,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM)	30.924,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (LP)	2.693,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT (RF-15)	9.565,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penyusunan NSPK Pelayanan Kesehatan Bergerak (LP-1)	2.890,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (LP-1)	1.183,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP-2)	4.276,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	665,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (TK)	20.915,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan (HS)	12.412,6	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188288 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pendidikan dan Pelatihan Kekarantinaan Kesehatan (HS)	3.287,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring *Surveilans* dan Respons KLB/Wabah	7.254,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging (HS)	877,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi *Emerging* (HS)	1.789,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok (LP)	7.378,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah (LP)	1.875,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya (rujukan)	880.439,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM)	10.354,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Imunisasi	3.901,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kab/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan	15.325,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Annual *Review* dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK-18)	1.985,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Bidang Infeksi *Emerging* (HS)	1.019,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Operasional Tim Gerak Cepat Respons KLB	1.060,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Deteksi Dini PTM Prioritas (LP)	38.877,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar (rujukan)	1.270.162,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Makassar dan Surabaya (IsDB) (rujukan)	411.207,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP)	16.035,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP-9)	3.559,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pengendalian Vektor (HS)	1.010,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Program PTM Prioritas (LP)	4.700,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Deteksi Dini PPOK (LP)	1.312,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM)	26.786,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Transformasi Digital (TK)	92.501,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (HS)	2.777,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat dan Bahan Kesehatan *Surveilans* Berbasis Laboratorium (HS)	197,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian HIV (LP-8)	5.934,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	4.689,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Penerapan dan Penegakan KTR (LP)	1.440,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Petugas Laboratorium *Surveilans* (HS)	1.420,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi *Surveilans* Berbasis Laboratorium (HS)	1.554,8	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188289 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pelayanan kesehatan haji (HS)	15.703,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Intensifikasi Penemuan Kasus Baru dalam Rangka Eliminasi Malaria (LP-9)	1.738,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP-9)	6.287,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	3.399,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rencana Kontinjensi dan Simulasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (HS)	5.309,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS)	2.677,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	7.391,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	5.941,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Investigasi Peningkatan Kasus dan Kejadian Luar Biasa penyakit DBD dan *arbovirosis* lain (LP)	10.973,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pencapaian Eliminasi Eradikasi Penyakit Tropis Terabaikan (LP)	1.165,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan deteksi dini penyakit Tropis Terabaikan (LP)	2.146,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pengelola Program HIV Dinkes Provinsi (LP-8)	1.806,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemenuhan Alat, Reagen untuk Skrining, Diagnostik dan Pemantauan Pengobatan HIV AIDS (LP-8)	147.699,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	1.258,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)	1.174,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sarana dan Prasarana P2 TBC (LP-6)	15.001,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional (SDM)	14.784,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Dekonsentrasi) (LP)	577,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan klinik pratama (LP)	982,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendampingan Sertifikasi TKDN dan Manajemen Mutu Alat Kesehatan Dalam Negeri (RF-15)	446,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan (LP-4)	112.815,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Vaksin Imunisasi Program (LP-5)	1.861.767,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP-6)	859.829,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan program Pengendalian Malaria (LP-9)	57.411,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (LP-8)	300.373,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP-5)	124.774,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	2.674,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	3.558,7	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 188290 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	6.688,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional (HS))	1.241,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	1.941,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	7.858,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	2.461,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	2.032,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	1.097,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	2.546,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	2.867,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
OM Akses Internet	614.612,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	205.409,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya	1.200.002,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN) - Kota Malang	27.342,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Kota Malang	43.149,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Baku Obat - Pusat	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	5.400,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Komersialisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam Negeri	1.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	189.675,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Layanan Kesehatan Hewan	421.309,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
Pemenuhan Rumah Sakit Polri (PN)	33.479,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan Fasilitas RnD dan Produksi Untuk Vaksin non-EPI	1.679.000,0	BUMN
Pengembangan Fasilitas *Yeast Based*		BUMN
Pembangunan Fasilitas Produksi *Bulk* Vaksin Rotavirus		BUMN
Pembangunan Fasilitas Radiofarmaka *(Cyclotron)*		BUMN
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
23) MP: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	**2.666.321,4**	
Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	210,2	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PN)	2.204,4	KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL JAMBI-RENGAT SEKSI 1	1.274.387,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188291 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG - JAMBI	1.389.419,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	41.100.000,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
24) MP: Kereta Api Makassar-Pare Pare	**510.223,3**	
Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	33.733,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (Dukungan/Pendamping KPBU)	267.490,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun lintas Makassar-Parepare	109.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
25) MP: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	**870.429,5**	
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - AKSES TOL PATIMBAN	166.729,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	75.800,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Patimban *Port Development Project Phase* I-2 (II)	598.300,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban	500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Patimban *Port Development Project* I-3 (III)	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Lingkungan Pelabuhan Patimban	29.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Optimalisasi Pelabuhan Sorong	5.586.800,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Makassar *New Port* Tahap 1B dan Tahap 1C		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan *New Priok Eastern Access* (NPEA)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Terminal Kalibaru		BUMN
Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
26) MP: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	**2.961.658,9**	
Subsidi Angkutan Penumpang (*Buy The Service*) Jabodetabek	78.478,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 188292 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	19.660,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Jawa Barat	18.168,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten	7.082,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Segmen Haurpugur - Cicalengka	199.711,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai	679.235,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Surabaya Regional *Railway Line* (*Phase* I)	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III *Stage I*)	583.300,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase* I	3.400,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Stasiun Rangkasbitung	195.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta	68.595,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	378.122,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok	59.462,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	1.378,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Jalur KA Segmen Labuan - Belawan Lintas Medan - Belawan Tahap II	144.830,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I	242.990,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	59.999,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembelian Layanan (*Buy The Service*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Medan (Prioritas Nasional)	47.919,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Bandung (Prioritas Nasional)	64.524,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Surabaya (Prioritas Nasional)	55.378,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Makassar (Prioritas Nasional)	54.119,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan dan Pengadaan Transportasi Massal (Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota Metropolitan	197.000,0	BUMN
27) MP: Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	**636,8**	
Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	636,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SK No 188293 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban	75.227.370,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Kilang Olefin		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan RDMP *Rescaling* RU V Balikpapan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
28) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	**413.312,1**	
Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1.680,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	205.745,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Monitoring dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan	1.527,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTMH	56.984,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1.583,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	2.738,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTS Terpadu	99.543,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	938,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTM	36.871,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	340,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik	2.738,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pemeliharaan Aset Pembangkit dan Jaringan Transmisi	110.783.490,0	BUMN
Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penuntasan dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: *Backbone* Interkoneksi Kalimantan		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: *Backbone* Interkoneksi Nusa Tenggara		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: *Backbone* Interkoneksi Sulawesi		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: *Backbone* Interkoneksi Sumatera		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Pemasaran		BUMN
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem JMB		BUMN

SK No 188294 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem Maluku dan Papua		BUMN
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan di PLTA Kumbih 3 (45MW)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pembangkit Listrik: Non-EBT		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Cikotok		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kertamukti		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS Bali Barat		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS Bali Timur		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Tuik		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sisira		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Simonggo		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sidikalang 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Raisan Nagatimbul		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Raisan Hutadolok		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Rahu 2	19.439.440,0	SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Rabi Jonggor		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Ordi Hulu		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Pantan Cuaca		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kukusan 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Sumber Jaya		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTA Merangin		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Lae Ordi-1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kineppen		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Ketaun 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188295 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTM Kanzy 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Kandibata 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Huta Padang		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bendungan PU Batanghari		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 5		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 4		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Batang Toru 3		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTA Batang Toru		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Aek Tomuan-1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Aek Situmandi		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTB Tanah Laut Tahap 1		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTB Tanah Laut Tahap 2		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bone Bolango		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Bungin III		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Belajen		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Koro Yaentu		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTM Dominanga		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBm		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTSa		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTBg		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 35 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 10 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188296 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTMGU 240 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 25 MW PLTMG 45 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 50 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan PLTS 150 MW PLTU 1360 MW		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan RDF *Plant*		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap		SWASTA (Terintegrasi dengan PSN)
29) MP: Transformasi Digital	**13.407.817,5**	
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	3.265,9	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1.500,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2.345,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Pembentukan tim Respons Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Integrasi *Cyber Intelligent Analytics* (CIA)	30.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2024)	2.687,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang teregistrasi (RKP 2024)	1.838,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2024)	299,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Platform *E-learning* Madrasah yang Dikelola	9.250,0	KEMENTERIAN AGAMA
Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	19.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi AntarLembaga	2.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village*	70.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Desa Digital yang dikembangkan melalui Platform Akademi Desa 4.0	18.777,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	8.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sistem Informasi yang Terintegrasi dalam ASDK	211,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (PN)	1.055,4	KEMENTERIAN KEUANGAN
Core Tax System (PN)	311.457,2	KEMENTERIAN KEUANGAN
Digital Talent Scholarship	48.684,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	64.838,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK No 188297 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	2.360,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akses Internet Tetap Pitalebar untuk UMKM dan Fasilitas Umum	15.276,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan Terkait Tekno Ekonomi Dan Teknologi Penyiaran *Multiplatform*	5.300,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan tentang Penyediaan Sistem Komunikasi Nasional untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB)	10.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pendidikan	4.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB)	1.800,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	15.523,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian	3.900,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM	21.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi *Business Matchmaking Startup Digital*	19.200,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Telekomunikasi	5.957,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	72.230,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kerjasama Badan Usaha	66.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Palapa Ring	1.769.056,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana *Digital Broadcasting System*	1.655.386,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Masterplan *Smart City*	8.300,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif	62.528,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	6.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Kesehatan	3.750,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim	3.850,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Digital *Technopreneur*	46.763,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS 4G / *Lastmile*	1.184.615,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Penyiaran	10.720,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Makassar	5.449,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	11.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama	3.073,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk)	12.666,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	1.526,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pariwisata	3.600,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK No 188298 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Logistik	3.900,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Pos	2.567,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat	1.001.271,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Data Center Nasional	1.144.938,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	1.973,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Akselerasi *Startup Game*	12.800,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Medan	5.341,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Jakarta	2.308,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.929,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fasilitasi Literasi Digital	450.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet	614.612,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.070,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Big Data Nasional dan Kecerdasan Buatan Layanan Pemerintah	1.310,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	205.409,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Layanan Big Data Nasional dan Kecerdasan Buatan Layanan Pemerintah	2.190,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Bandung	2.244,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Yogyakarta	2.276,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Jaringan Intra Pemerintah	15.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Penyediaan Kapasitas Satelit	1.189.363,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Surabaya	2.321,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Banjarmasin	2.315,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM SATRIA 1	1.651.902,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Manado	2.345,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK	5.272,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Pusdiklat	4.221,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Medan	5.425,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar	5.425,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK No 188299 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Manado	3.481,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Talent Scholarship di BPPTIK	5.946,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)	76.484,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS)	52.333,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Broadband*	19.781,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyiaran	3.417,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Pengendalian IMEI	2.128,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sarana Pendukung dalam Rangka Pengembangan Laboratorium BBPPT	2.105,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	2.268,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	12.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	4.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pendukungan Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	24.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital	1.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Startup Digital yang dikembangkan	8.360,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Inkubasi pelaku parekraf dalam bertransformasi digital	1.220,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif	3.750,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Be Creative District (BCD) yang Dikembangkan	750,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	3.490,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	69.375,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar	702.376,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Mendapat Pembinaan	889,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi	7.881,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	5.400,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

SK No 188300 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	2.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi	4.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi	5.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan *Apparel*	1.975,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Tenaga Kerja Industri 4.0	1.858,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan *Making* Indonesia 4.0	5.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Siber	85.631,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN)	175,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Penanganan Tindak Pidana Siber (PN)	11.843,1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN)	40.005,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Pojok Baca Digital di Daerah	27.170,9	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
E-Journal yang Dilanggan	40.741,4	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialihmediakan	8.899,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran	36.714,0	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru	71.949,1	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Kanal Pendidikan dan Budaya	12.872,2	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Percepatan Pengembangan Digital Sistem Kelistrikan Indonesia	8.068.600,0	BUMN
Proyek Revitalisasi Palapa Ring rute Manado - Ondong Siau		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut PASELA (Papua Selatan)		BUMN
Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut SUB-2		BUMN
Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Labuha-Obi		BUMN
Pembangunan *Outside Plant Fiber Optic Backbone* Perbatasan Kalbar PLBN Nanga Badau dan Putussibau		BUMN
Pembangunan *Data Center* NeuCentrIX Malang dan Pugeran Yogyakarta		BUMN
Pembangunan Lanjutan *Data Center* Batam		BUMN

SK No 188301 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Lanjutan *Data Center* Cikarang		BUMN
Pengadaan Satelit HTS 113 BT		BUMN
Pengembangan *Land Registration Information System* (Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)	250.000,0	SWASTA
30) MP: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	**2.734.075,0**	
Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah	5.438,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Penurunan Muka Tanah (Rekomendasi)	13.309,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah	1.224,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Hasil Pemantauan Perubahan Muka Tanah	724,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	751.522,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Saluran Tarum Barat yang ditingkatkan	90.605,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang dibangun	175.337,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun (Tahap II)	268.489,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengaman Pantai Kabupaten Cirebon yang dibangun	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1A	308.508,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1B	844.484,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1C	244.431,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
31) MP: 18 Waduk Multiguna	**18.906.757,9**	
Bendungan Cibeet yang dibangun	239.113,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Cijurey yang dibangun	184.924,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Matenggeng *Multipurpose Dam Development Sub Project* (ESP KOICA)	4.384,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Kedunglanggar yang dibangun	1.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Mbay yang dibangun	609.260,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Keureuto yang dibangun	317.298,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188302 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Bendungan Rukoh yang dibangun	430.123,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh yang dibangun	707.810,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Lau Simeme yang dibangun	257.295,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Tiga Dihaji yang dibangun	3.339.230,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun	183.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Kuningan yang dibangun	2.212,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Leuwikeris yang dibangun	194.709,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Jragung yang dibangun	1.467.441,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Bener yang dibangun	3.293.675,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Jlantah yang dibangun	289.456,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Bagong yang dibangun	1.282.017,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Sidan yang dibangun	407.231,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Meninting yang dibangun	482.534,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Manikin yang dibangun	1.552.625,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Bulango Ulu yang dibangun	1.596.127,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Budong-Budong yang dibangun	978.235,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Pamukkulu yang dibangun	22.537,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Way Apu yang dibangun	773.084,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188303 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Bendungan Cabean yang dibangun	64.047,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan Kawasan Bendungan Payaseunara yang dibangun	23.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bendungan Karangnongko yang dibangun	97.395,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Daerah irigasi Beringin Sila yang dibangun	20.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Daerah Irigasi Manganti (SI Cihaur) yang direhabilitasi	85.985,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
32) MP: Jembatan Udara 37 Rute di Papua	**719.428,1**	
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap IV, Jayawijaya, Papua Pegunungan	102.914,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah	120.537,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah, Boven Diegoel, Papua Selatan	40.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Layanan Angkutan Udara Kargo (MP)	13.932,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	91.207,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	6.553,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan	30.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin Tahap II, Mimika, Papua Tengah	90.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan	76.783,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua	2.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Agandugume	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Mopah Tahap II, Merauke, Papua Selatan	40.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
33) MP: Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	**1.141.876,6**	
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SINABANG - LASIKIN - INOR - NASREUHE	3.600,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ROKOT - SIOBAN	195.613,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Aceh	3.600,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SINABANG - LASIKIN - INOR - NASREUHE	4.768,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Afulu - Bts Kab Nias Barat (P. Nias)	9.326,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sumatera Barat	7.261,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - WAINGAPU - MELOLO	5.600,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188304 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Kepulauan Riau	7.130,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Teluk Buton - Klarik	143.296,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Kab. Natuna	18.161,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - RAINIS - MELONGGUANE	2.333,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. WAIPIA - SALEMAN	44.753,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SALEMAN - BESI (KM. 50)	5.940,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PASAHARI - KOBISONTA	1.878,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TANIWEL - SALEMAN	2.727,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TANIWEL - SALEMAN	6.170,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - KAIRATU - WAISELAN	3.163,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LIANG - SP. WAIPIA	2.889,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TAMILOW - H A Y A	8.846,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - AIR BUAYA - SAMALAGI	2.376,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - MAKO - MODANMOHE	41.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN BULA - MASIWANG - AIR NANANG	22.808,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari - Malakoni - Kahyapu)	147.761,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut (P. Key Besar)	14.256,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - WAINGAPU - MELOLO	15.355,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - WAIKELO - WAITABULA	1.530,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - MELOLO - BAING	2.590,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	5.896,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - RAINIS - MELONGGUANE	5.653,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara	4.778,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara	1.993,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188305 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BEO - ESANG	65.685,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN BULA - MASIWANG - AIR NANANG	13.212,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	4.838,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	108.283,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI MASKANO, CS	19.028,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PASAHARI - KOBISONTA	7.433,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TAMILOW - H A Y A	9.365,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Kab. Buru	5.243,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. NAMLEA - MARLOSO	4.615,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - WAISALA	8.517,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - KAIRATU - WAISELAN	17.009,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TEPA - MASBUAR - LETWURUNG	43.835,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	5.469,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Kab. Maluku Barat Daya	1.885,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SOFI WAYABULA 1	80.223,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
34) MP: Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	**1.203.503,1**	
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	27.355,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	2.184,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MOANEMANI - BEDUDIPA	49.414,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BEDUDIPA - BTS. KOTA NABIRE	10.937,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KOTA NABIRE - WANGGAR	1.540,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MINDIPTANA - TANAH MERAH	1.067,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KAB. BOVEN DIGOEL /MERAUKE - MUTING	14.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BUPUL - ERAMBU - SOTA	6.690,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SOTA - KM 40	33.662,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA	33.314,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188306 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KARUBAGA - ILU - MULIA	26.497,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA	7.571,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ORANSBARI - RANSIKI	1.477,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WANGGAR - KWATOSPRE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	57.290,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN DRS ESAU SESA - ORANSBARI	3.510,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN DRS ESAU SESA - ORANSBARI	1.269,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	126.060,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN RUAS ELELIM - MAMBERAMO	12.644,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN SEREDALA-DEKAI 1	18.659,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	47.787,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN LANDIK (JALAN WAMENA-ELELIM)	16.570,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN POMAKO	23.547,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KAMBUAYA-KUMURKEH	25.152,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SISU - SNOPY - KEBAR	10.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat	43.138,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat	40.801,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ALIH TRASE GUNUNG PASIR	202.634,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SORONG - MAKBON	4.630,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KOTA SORONG - AIMAS (KM.23) - KLAMONO	1.755,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN	13.687,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG)	15.822,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAKBON - MEGA	34.834,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA)	68.552,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAYON - SIMPANG KAPIRAYA	74.267,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel	49.580,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAROPKO - MINDIPTANA	23.600,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 188307 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	8.726,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AKSES PELABUHANN YETETKUN II	11.265,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ENAROTALI - WAGETE	6.082,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua	19.550,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAGETE - MOANEMANI	1.589,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	19.235,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAMENA - HABEMA	3.280,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
35) MP: Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	**4.251.591,8**	
Sanitasi (1101 - Kab. Simeulue)	6.074,0	DAK
Sanitasi (1102 - Kab. Aceh Singkil)	7.383,0	DAK
Sanitasi (1103 - Kab. Aceh Selatan)	2.499,1	DAK
Sanitasi (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	7.317,3	DAK
Sanitasi (1105 - Kab. Aceh Timur)	9.385,7	DAK
Sanitasi (1106 - Kab. Aceh Tengah)	5.986,4	DAK
Sanitasi (1107 - Kab. Aceh Barat)	7.168,4	DAK
Sanitasi (1108 - Kab. Aceh Besar)	6.018,5	DAK
Sanitasi (1109 - Kab. Pidie)	12.011,8	DAK
Sanitasi (1110 - Kab. Bireuen)	6.987,2	DAK
Sanitasi (1111 - Kab. Aceh Utara)	10.276,6	DAK
Sanitasi (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	6.622,1	DAK
Sanitasi (1113 - Kab. Gayo Lues)	5.587,5	DAK
Sanitasi (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	7.840,0	DAK
Sanitasi (1115 - Kab. Nagan Raya)	6.078,7	DAK
Sanitasi (1116 - Kab. Aceh Jaya)	5.027,3	DAK
Sanitasi (1117 - Kab. Bener Meriah)	5.576,1	DAK
Sanitasi (1118 - Kab. Pidie Jaya)	6.886,2	DAK
Sanitasi (1171 - Kota Banda Aceh)	6.076,8	DAK
Sanitasi (1172 - Kota Sabang)	6.309,7	DAK
Sanitasi (1173 - Kota Langsa)	6.485,2	DAK
Sanitasi (1174 - Kota Lhokseumawe)	7.194,6	DAK
Sanitasi (1175 - Kota Subulussalam)	5.641,1	DAK
Sanitasi (1201 - Kab. Nias)	6.934,9	DAK
Sanitasi (1202 - Kab. Mandailing Natal)	12.887,7	DAK
Sanitasi (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	8.338,2	DAK
Sanitasi (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	6.668,8	DAK
Sanitasi (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	7.912,4	DAK
Sanitasi (1206 - Kab. Toba)	3.466,5	DAK

SK No 188308 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (1207 - Kab. Labuhanbatu)	7.872,9	DAK
Sanitasi (1208 - Kab. Asahan)	1.296,8	DAK
Sanitasi (1209 - Kab. Simalungun)	4.498,3	DAK
Sanitasi (1210 - Kab. Dairi)	3.988,5	DAK
Sanitasi (1211 - Kab. Karo)	4.328,2	DAK
Sanitasi (1212 - Kab. Deli Serdang)	10.796,0	DAK
Sanitasi (1213 - Kab. Langkat)	9.200,7	DAK
Sanitasi (1214 - Kab. Nias Selatan)	12.680,2	DAK
Sanitasi (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	7.029,1	DAK
Sanitasi (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	6.865,8	DAK
Sanitasi (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	5.458,8	DAK
Sanitasi (1219 - Kab. Batu Bara)	6.557,6	DAK
Sanitasi (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	7.508,6	DAK
Sanitasi (1221 - Kab. Padang Lawas)	9.051,0	DAK
Sanitasi (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	7.738,1	DAK
Sanitasi (1224 - Kab. Nias Utara)	8.132,2	DAK
Sanitasi (1225 - Kab. Nias Barat)	6.758,3	DAK
Sanitasi (1271 - Kota Sibolga)	1.574,4	DAK
Sanitasi (1272 - Kota Tanjung Balai)	6.172,7	DAK
Sanitasi (1273 - Kota Pematang Siantar)	6.045,3	DAK
Sanitasi (1274 - Kota Tebing Tinggi)	4.968,2	DAK
Sanitasi (1275 - Kota Medan)	6.077,8	DAK
Sanitasi (1276 - Kota Binjai)	5.844,8	DAK
Sanitasi (1277 - Kota Padangsidimpuan)	9.890,2	DAK
Sanitasi (1278 - Kota Gunungsitoli)	7.110,5	DAK
Sanitasi (1471 - Kota Pekanbaru)	1.260,0	DAK
Sanitasi (1571 - Kota Jambi)	3.780,0	DAK
Sanitasi (1671 - Kota Palembang)	1.050,0	DAK
Sanitasi (3201 - Kab. Bogor)	12.015,5	DAK
Sanitasi (3202 - Kab. Sukabumi)	6.437,6	DAK
Sanitasi (3203 - Kab. Cianjur)	5.198,1	DAK
Sanitasi (3204 - Kab. Bandung)	7.916,3	DAK
Sanitasi (3205 - Kab. Garut)	3.148,8	DAK
Sanitasi (3206 - Kab. Tasikmalaya)	9.546,7	DAK
Sanitasi (3207 - Kab. Ciamis)	12.311,6	DAK
Sanitasi (3208 - Kab. Kuningan)	10.076,3	DAK
Sanitasi (3209 - Kab. Cirebon)	10.796,0	DAK
Sanitasi (3210 - Kab. Majalengka)	2.795,2	DAK
Sanitasi (3211 - Kab. Sumedang)	8.207,8	DAK
Sanitasi (3212 - Kab. Indramayu)	7.694,8	DAK
Sanitasi (3214 - Kab. Purwakarta)	9.733,3	DAK
Sanitasi (3215 - Kab. Karawang)	14.566,4	DAK

SK No 188309 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (3216 - Kab. Bekasi)	8.091,8	DAK
Sanitasi (3217 - Kab. Bandung Barat)	2.799,0	DAK
Sanitasi (3218 - Kab. Pangandaran)	3.928,3	DAK
Sanitasi (3271 - Kota Bogor)	9.544,0	DAK
Sanitasi (3272 - Kota Sukabumi)	1.799,3	DAK
Sanitasi (3273 - Kota Bandung)	1.891,7	DAK
Sanitasi (3275 - Kota Bekasi)	2.399,1	DAK
Sanitasi (3276 - Kota Depok)	1.914,5	DAK
Sanitasi (3277 - Kota Cimahi)	7.599,2	DAK
Sanitasi (3278 - Kota Tasikmalaya)	5.335,0	DAK
Sanitasi (3279 - Kota Banjar)	2.667,5	DAK
Sanitasi (3301 - Kab. Cilacap)	9.404,1	DAK
Sanitasi (3302 - Kab. Banyumas)	11.311,3	DAK
Sanitasi (3303 - Kab. Purbalingga)	12.520,9	DAK
Sanitasi (3304 - Kab. Banjarnegara)	8.466,9	DAK
Sanitasi (3305 - Kab. Kebumen)	9.234,0	DAK
Sanitasi (3306 - Kab. Purworejo)	4.759,1	DAK
Sanitasi (3307 - Kab. Wonosobo)	14.994,5	DAK
Sanitasi (3308 - Kab. Magelang)	10.157,1	DAK
Sanitasi (3309 - Kab. Boyolali)	1.323,4	DAK
Sanitasi (3310 - Kab. Klaten)	3.693,5	DAK
Sanitasi (3312 - Kab. Wonogiri)	6.737,6	DAK
Sanitasi (3313 - Kab. Karanganyar)	3.901,8	DAK
Sanitasi (3314 - Kab. Sragen)	8.289,4	DAK
Sanitasi (3315 - Kab. Grobogan)	10.899,1	DAK
Sanitasi (3316 - Kab. Blora)	8.952,8	DAK
Sanitasi (3317 - Kab. Rembang)	3.498,7	DAK
Sanitasi (3318 - Kab. Pati)	6.742,7	DAK
Sanitasi (3320 - Kab. Jepara)	8.145,0	DAK
Sanitasi (3321 - Kab. Demak)	7.457,3	DAK
Sanitasi (3322 - Kab. Semarang)	1.999,3	DAK
Sanitasi (3323 - Kab. Temanggung)	10.419,9	DAK
Sanitasi (3324 - Kab. Kendal)	4.048,5	DAK
Sanitasi (3325 - Kab. Batang)	5.073,1	DAK
Sanitasi (3326 - Kab. Pekalongan)	11.692,0	DAK
Sanitasi (3327 - Kab. Pemalang)	5.386,3	DAK
Sanitasi (3328 - Kab. Tegal)	2.519,1	DAK
Sanitasi (3329 - Kab. Brebes)	4.408,4	DAK
Sanitasi (3371 - Kota Magelang)	3.608,4	DAK
Sanitasi (3372 - Kota Surakarta)	1.855,5	DAK
Sanitasi (3373 - Kota Salatiga)	3.788,6	DAK
Sanitasi (3374 - Kota Semarang)	1.851,8	DAK

SK No 188310 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi (3376 - Kota Tegal)	5.498,0	DAK
Sanitasi (3501 - Kab. Pacitan)	5.066,7	DAK
Sanitasi (3502 - Kab. Ponorogo)	9.758,1	DAK
Sanitasi (3503 - Kab. Trenggalek)	9.530,7	DAK
Sanitasi (3504 - Kab. Tulungagung)	11.427,4	DAK
Sanitasi (3505 - Kab. Blitar)	11.671,2	DAK
Sanitasi (3506 - Kab. Kediri)	6.149,0	DAK
Sanitasi (3507 - Kab. Malang)	7.647,2	DAK
Sanitasi (3508 - Kab. Lumajang)	13.107,4	DAK
Sanitasi (3509 - Kab. Jember)	3.652,7	DAK
Sanitasi (3510 - Kab. Banyuwangi)	2.438,7	DAK
Sanitasi (3511 - Kab. Bondowoso)	8.802,8	DAK
Sanitasi (3512 - Kab. Situbondo)	12.185,5	DAK
Sanitasi (3513 - Kab. Probolinggo)	11.003,5	DAK
Sanitasi (3514 - Kab. Pasuruan)	1.819,3	DAK
Sanitasi (3515 - Kab. Sidoarjo)	9.057,0	DAK
Sanitasi (3516 - Kab. Mojokerto)	5.585,0	DAK
Sanitasi (3517 - Kab. Jombang)	7.837,1	DAK
Sanitasi (3518 - Kab. Nganjuk)	10.388,6	DAK
Sanitasi (3519 - Kab. Madiun)	8.763,1	DAK
Sanitasi (3520 - Kab. Magetan)	3.598,7	DAK
Sanitasi (3521 - Kab. Ngawi)	10.028,0	DAK
Sanitasi (3522 - Kab. Bojonegoro)	4.178,5	DAK
Sanitasi (3523 - Kab. Tuban)	12.624,7	DAK
Sanitasi (3524 - Kab. Lamongan)	7.500,0	DAK
Sanitasi (3525 - Kab. Gresik)	3.086,4	DAK
Sanitasi (3526 - Kab. Bangkalan)	14.158,4	DAK
Sanitasi (3527 - Kab. Sampang)	11.395,8	DAK
Sanitasi (3528 - Kab. Pamekasan)	10.621,1	DAK
Sanitasi (3529 - Kab. Sumenep)	14.994,5	DAK
Sanitasi (3571 - Kota Kediri)	12.395,5	DAK
Sanitasi (3572 - Kota Blitar)	1.842,3	DAK
Sanitasi (3573 - Kota Malang)	8.705,1	DAK
Sanitasi (3574 - Kota Probolinggo)	1.319,5	DAK
Sanitasi (3575 - Kota Pasuruan)	1.196,6	DAK
Sanitasi (3576 - Kota Mojokerto)	3.716,9	DAK
Sanitasi (3577 - Kota Madiun)	13.000,0	DAK
Sanitasi (3601 - Kab. Pandeglang)	5.132,5	DAK
Sanitasi (3602 - Kab. Lebak)	8.520,8	DAK
Sanitasi (3603 - Kab. Tangerang)	2.374,1	DAK
Sanitasi (3604 - Kab. Serang)	8.325,7	DAK
Sanitasi (3673 - Kota Serang)	7.585,5	DAK

SK No 188311 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Sanitasi (5201 - Kab. Lombok Barat)	10.969,5	DAK	
Sanitasi (5202 - Kab. Lombok Tengah)	10.018,6	DAK	
Sanitasi (5203 - Kab. Lombok Timur)	8.596,8	DAK	
Sanitasi (5204 - Kab. Sumbawa)	8.760,7	DAK	
Sanitasi (5205 - Kab. Dompu)	8.009,4	DAK	
Sanitasi (5206 - Kab. Bima)	8.947,7	DAK	
Sanitasi (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	3.323,8	DAK	
Sanitasi (5208 - Kab. Lombok Utara)	7.907,4	DAK	
Sanitasi (5271 - Kota Mataram)	7.679,2	DAK	
Sanitasi (5272 - Kota Bima)	6.504,5	DAK	
Sanitasi (5301 - Kab. Sumba Barat)	6.775,0	DAK	
Sanitasi (5302 - Kab. Sumba Timur)	9.272,0	DAK	
Sanitasi (5303 - Kab. Kupang)	7.427,1	DAK	
Sanitasi (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	10.285,0	DAK	
Sanitasi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	6.274,0	DAK	
Sanitasi (5306 - Kab. Belu)	7.623,2	DAK	
Sanitasi (5307 - Kab. Alor)	6.282,7	DAK	
Sanitasi (5308 - Kab. Lembata)	5.916,9	DAK	
Sanitasi (5309 - Kab. Flores Timur)	7.777,8	DAK	
Sanitasi (5311 - Kab. Ende)	6.188,7	DAK	
Sanitasi (5312 - Kab. Ngada)	6.048,6	DAK	
Sanitasi (5313 - Kab. Manggarai)	9.774,1	DAK	
Sanitasi (5314 - Kab. Rote Ndao)	3.666,7	DAK	
Sanitasi (5315 - Kab. Manggarai Barat)	6.370,4	DAK	
Sanitasi (5316 - Kab. Sumba Tengah)	6.370,0	DAK	
Sanitasi (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	9.142,6	DAK	
Sanitasi (5318 - Kab. Nagekeo)	5.995,0	DAK	
Sanitasi (5319 - Kab. Manggarai Timur)	8.531,8	DAK	
Sanitasi (5320 - Kab. Sabu Raijua)	6.060,8	DAK	
Sanitasi (5321 - Kab. Malaka)	6.745,6	DAK	
Sanitasi (6101 - Kab. Sambas)	8.343,7	DAK	
Sanitasi (6102 - Kab. Bengkayang)	7.764,8	DAK	
Sanitasi (6103 - Kab. Landak)	9.879,8	DAK	
Sanitasi (6104 - Kab. Mempawah)	5.970,5	DAK	
Sanitasi (6105 - Kab. Sanggau)	9.254,9	DAK	
Sanitasi (6106 - Kab. Ketapang)	8.036,2	DAK	
Sanitasi (6107 - Kab. Sintang)	7.969,7	DAK	
Sanitasi (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	7.635,2	DAK	
Sanitasi (6109 - Kab. Sekadau)	6.870,2	DAK	
Sanitasi (6110 - Kab. Melawi)	8.371,4	DAK	
Sanitasi (6111 - Kab. Kayong Utara)	5.750,9	DAK	
Sanitasi (6112 - Kab. Kubu Raya)	14.314,5	DAK	

SK No 188312 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Sanitasi (6171 - Kota Pontianak)	3.378,4	DAK	
Sanitasi (6172 - Kota Singkawang)	1.994,8	DAK	
Sanitasi (6301 - Kab. Tanah Laut)	5.128,1	DAK	
Sanitasi (6302 - Kab. Kotabaru)	3.656,2	DAK	
Sanitasi (6303 - Kab. Banjar)	9.170,4	DAK	
Sanitasi (6304 - Kab. Barito Kuala)	10.720,2	DAK	
Sanitasi (6305 - Kab. Tapin)	5.739,3	DAK	
Sanitasi (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	7.844,8	DAK	
Sanitasi (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah)	4.502,3	DAK	
Sanitasi (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	4.658,3	DAK	
Sanitasi (6309 - Kab. Tabalong)	5.677,6	DAK	
Sanitasi (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	7.105,5	DAK	
Sanitasi (6311 - Kab. Balangan)	6.515,2	DAK	
Sanitasi (6371 - Kota Banjarmasin)	2.807,9	DAK	
Sanitasi (6372 - Kota Banjarbaru)	4.398,4	DAK	
Sanitasi (7204 - Kab. Poso)	3.322,0	DAK	
Sanitasi (7401 - Kab. Buton)	6.022,3	DAK	
Sanitasi (7402 - Kab. Muna)	12.166,9	DAK	
Sanitasi (7403 - Kab. Konawe)	5.269,1	DAK	
Sanitasi (7404 - Kab. Kolaka)	5.920,5	DAK	
Sanitasi (7405 - Kab. Konawe Selatan)	7.560,7	DAK	
Sanitasi (7406 - Kab. Bombana)	7.038,1	DAK	
Sanitasi (7407 - Kab. Wakatobi)	6.291,6	DAK	
Sanitasi (7408 - Kab. Kolaka Utara)	9.487,7	DAK	
Sanitasi (7409 - Kab. Buton Utara)	5.586,4	DAK	
Sanitasi (7410 - Kab. Konawe Utara)	1.378,9	DAK	
Sanitasi (7411 - Kab. Kolaka Timur)	6.638,5	DAK	
Sanitasi (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	3.988,5	DAK	
Sanitasi (7413 - Kab. Muna Barat)	5.991,9	DAK	
Sanitasi (7414 - Kab. Buton Tengah)	5.559,5	DAK	
Sanitasi (7415 - Kab. Buton Selatan)	7.050,5	DAK	
Sanitasi (7471 - Kota Kendari)	7.678,1	DAK	
Sanitasi (7472 - Kota Bau Bau)	5.647,9	DAK	
Sanitasi (7601 - Kab. Majene)	6.485,4	DAK	
Sanitasi (7602 - Kab. Polewali Mandar)	7.202,2	DAK	
Sanitasi (7603 - Kab. Mamasa)	8.027,4	DAK	
Sanitasi (7604 - Kab. Mamuju)	7.945,6	DAK	
Sanitasi (7605 - Kab. Pasangkayu)	6.109,7	DAK	
Sanitasi (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	5.394,2	DAK	
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1171 - Kota Banda Aceh)	1.732,5	DAK	
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1811 - Kab. Mesuji)	1.628,6	DAK	

SK No 188313 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1901 - Kab. Bangka)	1.292,5	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1904 - Kab. Bangka Tengah)	1.637,3	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1905 - Kab. Bangka Selatan)	1.484,4	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga)	1.155,5	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3304 - Kab. Banjarnegara)	1.877,6	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang)	1.686,6	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3324 - Kab. Kendal)	1.512,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3326 - Kab. Pekalongan)	1.315,1	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pemalang)	2.234,9	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3373 - Kota Salatiga)	2.684,3	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3375 - Kota Pekalongan)	2.633,4	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3502 - Kab. Ponorogo)	1.312,5	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3508 - Kab. Lumajang)	1.380,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3525 - Kab. Gresik)	3.092,3	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3577 - Kota Madiun)	2.275,0	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6302 - Kab. Kotabaru)	2.493,8	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	4.347,1	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7206 - Kab. Toli Toli)	1.954,8	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7303 - Kab. Bantaeng)	1.953,6	DAK
Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8205 - Kab. Halmahera Utara)	4.389,0	DAK
Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	800,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan *Leachate* TPA	250,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK No 188314 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	202.794,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.672.874,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	56.814,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	622.658,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
36) MP: Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	**5.856.919,8**	
Air Minum (1101 - Kab. Simeulue)	5.450,3	DAK
Air Minum (1102 - Kab. Aceh Singkil)	3.804,8	DAK
Air Minum (1103 - Kab. Aceh Selatan)	14.852,6	DAK
Air Minum (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	6.709,8	DAK
Air Minum (1105 - Kab. Aceh Timur)	15.451,2	DAK
Air Minum (1106 - Kab. Aceh Tengah)	9.941,9	DAK
Air Minum (1107 - Kab. Aceh Barat)	9.060,3	DAK
Air Minum (1108 - Kab. Aceh Besar)	15.317,7	DAK
Air Minum (1109 - Kab. Pidie)	15.530,0	DAK
Air Minum (1110 - Kab. Bireuen)	12.546,9	DAK
Air Minum (1111 - Kab. Aceh Utara)	15.530,0	DAK
Air Minum (1112 - Kab. Aceh Barat Daya)	6.089,5	DAK
Air Minum (1113 - Kab. Gayo Lues)	8.633,0	DAK
Air Minum (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	1.906,7	DAK
Air Minum (1115 - Kab. Nagan Raya)	1.656,5	DAK
Air Minum (1116 - Kab. Aceh Jaya)	11.369,5	DAK
Air Minum (1117 - Kab. Bener Meriah)	11.289,2	DAK
Air Minum (1118 - Kab. Pidie Jaya)	10.619,0	DAK
Air Minum (1171 - Kota Banda Aceh)	8.735,6	DAK
Air Minum (1172 - Kota Sabang)	6.814,0	DAK
Air Minum (1173 - Kota Langsa)	3.430,2	DAK
Air Minum (1174 - Kota Lhokseumawe)	3.623,7	DAK
Air Minum (1175 - Kota Subulussalam)	6.778,2	DAK
Air Minum (12 - Provinsi Sumatera Utara)	59.973,0	DAK
Air Minum (1201 - Kab. Nias)	14.524,0	DAK
Air Minum (1202 - Kab. Mandailing Natal)	15.356,7	DAK
Air Minum (3602 - Kab. Lebak)	13.210,0	DAK
Air Minum (3603 - Kab. Tangerang)	3.287,9	DAK
Air Minum (3604 - Kab. Serang)	14.937,5	DAK
Air Minum (3673 - Kota Serang)	2.574,3	DAK
Air Minum (5201 - Kab. Lombok Barat)	15.488,6	DAK
Air Minum (5202 - Kab. Lombok Tengah)	13.256,4	DAK
Air Minum (5203 - Kab. Lombok Timur)	8.007,8	DAK
Air Minum (5204 - Kab. Sumbawa)	13.966,7	DAK

SK No 188315 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (5205 - Kab. Dompu)	10.802,1	DAK
Air Minum (5206 - Kab. Bima)	13.939,2	DAK
Air Minum (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	8.952,9	DAK
Air Minum (5208 - Kab. Lombok Utara)	10.917,5	DAK
Air Minum (5272 - Kota Bima)	7.625,5	DAK
Air Minum (5301 - Kab. Sumba Barat)	11.100,1	DAK
Air Minum (5302 - Kab. Sumba Timur)	14.864,5	DAK
Air Minum (5303 - Kab. Kupang)	11.527,5	DAK
Air Minum (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	9.276,6	DAK
Air Minum (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	4.574,8	DAK
Air Minum (5306 - Kab. Belu)	12.940,6	DAK
Air Minum (5307 - Kab. Alor)	9.741,2	DAK
Air Minum (5308 - Kab. Lembata)	6.263,8	DAK
Air Minum (5309 - Kab. Flores Timur)	10.846,7	DAK
Air Minum (5311 - Kab. Ende)	13.010,1	DAK
Air Minum (5312 - Kab. Ngada)	6.893,5	DAK
Air Minum (5313 - Kab. Manggarai)	3.420,2	DAK
Air Minum (5314 - Kab. Rote Ndao)	1.492,4	DAK
Air Minum (5315 - Kab. Manggarai Barat)	10.831,0	DAK
Air Minum (5316 - Kab. Sumba Tengah)	14.163,8	DAK
Air Minum (5317 - Kab. Sumba Barat Daya)	14.864,5	DAK
Air Minum (5318 - Kab. Nagekeo)	14.692,4	DAK
Air Minum (5319 - Kab. Manggarai Timur)	4.876,4	DAK
Air Minum (5320 - Kab. Sabu Raijua)	11.428,1	DAK
Air Minum (5321 - Kab. Malaka)	10.515,3	DAK
Air Minum (5371 - Kota Kupang)	1.035,3	DAK
Air Minum (6101 - Kab. Sambas)	15.504,1	DAK
Air Minum (6102 - Kab. Bengkayang)	14.864,5	DAK
Air Minum (6103 - Kab. Landak)	14.534,4	DAK
Air Minum (6104 - Kab. Mempawah)	2.358,5	DAK
Air Minum (6105 - Kab. Sanggau)	10.575,8	DAK
Air Minum (6106 - Kab. Ketapang)	3.983,7	DAK
Air Minum (6107 - Kab. Sintang)	11.968,4	DAK
Air Minum (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	9.912,1	DAK
Air Minum (6109 - Kab. Sekadau)	3.493,2	DAK
Air Minum (6110 - Kab. Melawi)	14.513,7	DAK
Air Minum (6111 - Kab. Kayong Utara)	10.823,8	DAK
Air Minum (6112 - Kab. Kubu Raya)	14.864,5	DAK
Air Minum (6171 - Kota Pontianak)	2.946,4	DAK
Air Minum (6172 - Kota Singkawang)	8.653,9	DAK
Air Minum (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	50.000,0	DAK
Air Minum (6301 - Kab. Tanah Laut)	9.367,1	DAK

SK No 188316 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (6302 - Kab. Kotabaru)	7.413,9	DAK
Air Minum (6303 - Kab. Banjar)	10.241,5	DAK
Air Minum (6304 - Kab. Barito Kuala)	15.530,0	DAK
Air Minum (6305 - Kab. Tapin)	9.451,1	DAK
Air Minum (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan)	14.456,1	DAK
Air Minum (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara)	13.900,7	DAK
Air Minum (6309 - Kab. Tabalong)	12.436,6	DAK
Air Minum (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	10.167,3	DAK
Air Minum (6311 - Kab. Balangan)	4.066,0	DAK
Air Minum (6372 - Kota Banjarbaru)	5.945,8	DAK
Air Minum (7201 - Kab. Banggai Kepulauan)	15.000,0	DAK
Air Minum (7204 - Kab. Poso)	4.647,6	DAK
Air Minum (7205 - Kab. Donggala)	6.665,4	DAK
Air Minum (7209 - Kab. Tojo Una Una)	8.000,0	DAK
Air Minum (7401 - Kab. Buton)	7.180,0	DAK
Air Minum (7402 - Kab. Muna)	10.933,0	DAK
Air Minum (7403 - Kab. Konawe)	7.269,1	DAK
Air Minum (7404 - Kab. Kolaka)	6.466,9	DAK
Air Minum (7405 - Kab. Konawe Selatan)	14.455,7	DAK
Air Minum (7406 - Kab. Bombana)	13.431,9	DAK
Air Minum (7407 - Kab. Wakatobi)	1.206,9	DAK
Air Minum (7409 - Kab. Buton Utara)	11.701,9	DAK
Air Minum (7410 - Kab. Konawe Utara)	6.115,5	DAK
Air Minum (7411 - Kab. Kolaka Timur)	10.775,9	DAK
Air Minum (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	9.426,3	DAK
Air Minum (7413 - Kab. Muna Barat)	6.375,8	DAK
Air Minum (7414 - Kab. Buton Tengah)	3.829,7	DAK
Air Minum (7415 - Kab. Buton Selatan)	3.272,7	DAK
Air Minum (7471 - Kota Kendari)	1.988,2	DAK
Air Minum (7472 - Kota Bau Bau)	7.258,7	DAK
Air Minum (7601 - Kab. Majene)	4.338,0	DAK
Air Minum (7602 - Kab. Polewali Mandar)	14.116,6	DAK
Air Minum (7603 - Kab. Mamasa)	15.530,0	DAK
Air Minum (7604 - Kab. Mamuju)	11.467,2	DAK
Air Minum (7605 - Kab. Pasangkayu)	14.864,5	DAK
Air Minum (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	10.993,2	DAK
Air Minum (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	4.655,5	DAK
Air Minum (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	15.530,0	DAK
Air Minum (1205 - Kab. Tapanuli Utara)	14.930,5	DAK
Air Minum (1206 - Kab. Toba)	4.874,0	DAK
Air Minum (1207 - Kab. Labuhanbatu)	1.734,2	DAK
Air Minum (1208 - Kab. Asahan)	6.887,2	DAK

SK No 188317 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (1209 - Kab. Simalungun)	10.741,5	DAK
Air Minum (1210 - Kab. Dairi)	12.652,1	DAK
Air Minum (1211 - Kab. Karo)	15.212,1	DAK
Air Minum (1212 - Kab. Deli Serdang)	15.000,0	DAK
Air Minum (1214 - Kab. Nias Selatan)	14.285,6	DAK
Air Minum (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	12.932,1	DAK
Air Minum (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	9.150,5	DAK
Air Minum (1217 - Kab. Samosir)	8.300,0	DAK
Air Minum (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	11.366,6	DAK
Air Minum (1219 - Kab. Batu Bara)	5.856,6	DAK
Air Minum (1220 - Kab. Padang Lawas Utara)	13.190,9	DAK
Air Minum (1221 - Kab. Padang Lawas)	9.508,3	DAK
Air Minum (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	6.342,2	DAK
Air Minum (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	6.307,5	DAK
Air Minum (1224 - Kab. Nias Utara)	14.823,4	DAK
Air Minum (1225 - Kab. Nias Barat)	14.370,4	DAK
Air Minum (1272 - Kota Tanjung Balai)	3.963,9	DAK
Air Minum (1274 - Kota Tebing Tinggi)	9.532,6	DAK
Air Minum (1275 - Kota Medan)	8.284,5	DAK
Air Minum (1276 - Kota Binjai)	9.351,2	DAK
Air Minum (1278 - Kota Gunungsitoli)	9.364,6	DAK
Air Minum (17 - Provinsi Bengkulu)	49.999,4	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (1705 - Kab. Seluma)	15.530,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	15.530,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (1771 - Kota Bengkulu)	15.530,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (1871 - Kota Bandar Lampung)	15.000,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3201 - Kab. Bogor)	9.035,2	DAK
Air Minum (3202 - Kab. Sukabumi)	12.695,0	DAK
Air Minum (3203 - Kab. Cianjur)	14.753,0	DAK
Air Minum (3204 - Kab. Bandung)	14.119,8	DAK
Air Minum (3205 - Kab. Garut)	13.470,9	DAK
Air Minum (3206 - Kab. Tasikmalaya)	12.993,4	DAK
Air Minum (3207 - Kab. Ciamis)	15.530,0	DAK
Air Minum (3208 - Kab. Kuningan)	6.243,1	DAK
Air Minum (3209 - Kab. Cirebon)	15.530,0	DAK
Air Minum (3210 - Kab. Majalengka)	14.220,4	DAK
Air Minum (3211 - Kab. Sumedang)	13.215.8	DAK
Air Minum (3212 - Kab. Indramayu)	3.473,5	DAK

SK No 188318 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (3213 - Kab. Subang)	2.985,3	DAK
Air Minum (3214 - Kab. Purwakarta)	14.863,5	DAK
Air Minum (3215 - Kab. Karawang)	14.213,1	DAK
Air Minum (3216 - Kab. Bekasi)	4.261,2	DAK
Air Minum (3217 - Kab. Bandung Barat)	6.441,3	DAK
Air Minum (3218 - Kab. Pangandaran)	9.491,4	DAK
Air Minum (3272 - Kota Sukabumi)	2.588,3	DAK
Air Minum (3275 - Kota Bekasi)	1.506,3	DAK
Air Minum (3276 - Kota Depok)	2.500,0	DAK
Air Minum (3277 - Kota Cimahi)	2.500,0	DAK
Air Minum (3278 - Kota Tasikmalaya)	11.663,0	DAK
Air Minum (3279 - Kota Banjar)	8.519,8	DAK
Air Minum (33 - Provinsi Jawa Tengah)	60.000,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3301 - Kab. Cilacap)	1.901,9	DAK
Air Minum (3302 - Kab. Banyumas)	6.757,6	DAK
Air Minum (3303 - Kab. Purbalingga)	12.910,6	DAK
Air Minum (3304 - Kab. Banjarnegara)	6.738,9	DAK
Air Minum (3305 - Kab. Kebumen)	10.260,1	DAK
Air Minum (3306 - Kab. Purworejo)	14.150,4	DAK
Air Minum (3307 - Kab. Wonosobo)	14.864,5	DAK
Air Minum (3308 - Kab. Magelang)	15.463,0	DAK
Air Minum (3309 - Kab. Boyolali)	3.391,5	DAK
Air Minum (3310 - Kab. Klaten)	2.127,1	DAK
Air Minum (3311 - Kab. Sukoharjo)	4.162,1	DAK
Air Minum (3312 - Kab. Wonogiri)	9.059,2	DAK
Air Minum (3313 - Kab. Karanganyar)	11.236,5	DAK
Air Minum (3314 - Kab. Sragen)	9.561,5	DAK
Air Minum (3315 - Kab. Grobogan)	5.901,4	DAK
Air Minum (3316 - Kab. Blora)	10.950,2	DAK
Air Minum (3317 - Kab. Rembang)	3.639,8	DAK
Air Minum (3318 - Kab. Pati)	5.095,5	DAK
Air Minum (3319 - Kab. Kudus)	6.350,3	DAK
Air Minum (3320 - Kab. Jepara)	6.324,0	DAK
Air Minum (3321 - Kab. Demak)	7.727,6	DAK
Air Minum (3322 - Kab. Semarang)	12.196,4	DAK
Air Minum (3323 - Kab. Temanggung)	8.281,1	DAK
Air Minum (3324 - Kab. Kendal)	5.519,1	DAK
Air Minum (3325 - Kab. Batang)	7.658,3	DAK
Air Minum (3326 - Kab. Pekalongan)	8.308,4	DAK
Air Minum (3327 - Kab. Pemalang)	12.320,4	DAK
Air Minum (3328 - Kab. Tegal)	2.752,5	DAK

SK No 188319 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum (3329 - Kab. Brebes)	14.858,6	DAK
Air Minum (3371 - Kota Magelang)	10.748,1	DAK
Air Minum (3372 - Kota Surakarta)	14.815,1	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3373 - Kota Salatiga)	7.031,9	DAK
Air Minum (3374 - Kota Semarang)	3.220,4	DAK
Air Minum (3376 - Kota Tegal)	1.486,5	DAK
Air Minum (3501 - Kab. Pacitan)	6.237,9	DAK
Air Minum (3502 - Kab. Ponorogo)	5.721,8	DAK
Air Minum (3503 - Kab. Trenggalek)	10.417,8	DAK
Air Minum (3504 - Kab. Tulungagung)	6.213,0	DAK
Air Minum (3505 - Kab. Blitar)	14.647,2	DAK
Air Minum (3506 - Kab. Kediri)	1.532,0	DAK
Air Minum (3507 - Kab. Malang)	6.169,9	DAK
Air Minum (3508 - Kab. Lumajang)	12.553,1	DAK
Air Minum (3509 - Kab. Jember)	1.988,6	DAK
Air Minum (3510 - Kab. Banyuwangi)	7.831,7	DAK
Air Minum (3511 - Kab. Bondowoso)	15.364,3	DAK
Air Minum (3512 - Kab. Situbondo)	7.084,0	DAK
Air Minum (3513 - Kab. Probolinggo)	7.576,0	DAK
Air Minum (3514 - Kab. Pasuruan)	14.363,6	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3515 - Kab. Sidoarjo)	15.000,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3516 - Kab. Mojokerto)	8.388,9	DAK
Air Minum (3517 - Kab. Jombang)	7.927,7	DAK
Air Minum (3518 - Kab. Nganjuk)	7.165,1	DAK
Air Minum (3519 - Kab. Madiun)	8.720,5	DAK
Air Minum (3520 - Kab. Magetan)	3.171,1	DAK
Air Minum (3521 - Kab. Ngawi)	14.210,5	DAK
Air Minum (3522 - Kab. Bojonegoro)	3.583,0	DAK
Air Minum (3523 - Kab. Tuban)	14.490,5	DAK
Air Minum (3524 - Kab. Lamongan)	5.884,0	DAK
Air Minum (3525 - Kab. Gresik)	15.000,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3526 - Kab. Bangkalan)	10.482,7	DAK
Air Minum (3527 - Kab. Sampang)	8.268,6	DAK
Air Minum (3528 - Kab. Pamekasan)	2.377,1	DAK
Air Minum (3529 - Kab. Sumenep)	10.010,8	DAK
Air Minum (3573 - Kota Malang)	1.500,0	DAK
Air Minum (3575 - Kota Pasuruan)	1.285,0	DAK (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (3579 - Kota Batu)	2.506,2	DAK

SK No 188320 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)		Instansi Pelaksana
Air Minum (3601 - Kab. Pandeglang)	7.234,9	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1377 - Kota Pariaman)	896,4	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1471 - Kota Pekanbaru)	466,6	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1473 - Kota Dumai)	5.539,2	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1811 - Kab. Mesuji)	1.360,7	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1901 - Kab. Bangka)	556,5	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1904 - Kab. Bangka Tengah)	983,7	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1905 - Kab. Bangka Selatan)	1.586,1	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga)	6.953,8	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3304 - Kab. Banjarnegara)	272,9	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang)	999,9	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3326 - Kab. Pekalongan)	705,6	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pemalang)	989,5	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3373 - Kota Salatiga)	1.575,0	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3375 - Kota Pekalongan)	1.049,4	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3402 - Kab. Bantul)	215,3	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3502 - Kab. Ponorogo)	2.351,8	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3508 - Kab. Lumajang)	1.671,1	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3525 - Kab. Gresik)	691,8	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3577 - Kota Madiun)	1.009,7	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6112 - Kab. Kubu Raya)	1.220,9	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6302 - Kab. Kotabaru)	3.117,2	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	14.032,0	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7206 - Kab. Toli Toli)	1.298,9	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7303 - Kab. Bantaeng)	210,5	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7471 - Kota Kendari)	765,8	DAK	
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8171 - Kota Ambon)	1.076,8	DAK	

SK No 188321 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8205 - Kab. Halmahera Utara)	14.250,0	DAK
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	460.411,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan SPAM Regional	962.294,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	138.614,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan SPAM Regional	42.428,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	258.894,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Regional	962.032,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	544.111,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku Tuk Uleng Kab. Brebes yang direhabilitasi	20.163,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang dibangun	10.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SPAM Jatiluhur 1 *(Unsolicited)* - Konstruksi Investasi BUP	560,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Karian - Serpong *(Unsolicited)* (Sisi Hulu) - Konstruksi Investasi BUP	810,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan SPAM Regional Karian Serpong	575.880,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pekanbaru *Water Supply*		BUMN
37) MP: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	**6.714.401,4**	
Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	729.348,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	327.323,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN)	5.657.729,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Revitalisasi Rusun Kebon Kacang	2.189.000,0	BUMN
Revitalisasi Rusun Kemayoran		BUMN
Revitalisasi Rusun Klender		BUMN
Revitalisasi Rusun Tanah Abang		BUMN
Proyek Pembangunan Super Blok Fatmawati	1.102.330,0	SWASTA
Pembangunan Hunian Vertikal (Apartemen) di Kawasan Perkantoran *South Quarter* Simatupang, Jakarta Selatan		SWASTA
38) MP: Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	**3.994,6**	
Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN	3.994,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Gas Kota	687.300,0	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)

SK No 188323 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
39) MP: Pemulihan 4 DAS Kritis	**27.000,0**	
Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	27.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
40) MP: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	(KA Cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi sejak tahun 2023 dan penyiapan KA *medium speed* Jakarta-Semarang masih dalam pembahasan)	
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
41) MP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	**108.960,5**	
Sosialisasi dan Diseminasi Penyehatan Lingkungan	1.658,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Konferensi dan *Event* Penyehatan Lingkungan	2.880,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kab/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan	15.325,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes	85.785,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	2.860,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	450,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
42) MP: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	**1.553.611,2**	
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Sumatera	12.502,1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Jawa	1.166,4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Kalimantan	6.564,9	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Sumatera	4.188,2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-TEWS yang dibangun di Pulau Sulawesi	3.794,6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun di Pulau Sumatera	2.911,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun di Pulau Kalimantan	2.538,6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun Kepulauan Maluku	6.364,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews Yang Dibangun Pulau Jawa	2.046,8	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews Yang Dibangun Pulau Papua	2.688,9	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Sistem operasional informasi kualitas Udara	12.565,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pemeliharaan peralatan operasional informasi iklim terapan dan kualitas udara	10.950,9	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	18.749,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

SK No 188325 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas	47.923,2	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengembangan sistem *big data* dan HPC melalui IDRIP	33.943,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pemeliharaan operasional aloptama MKG	130.799,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Jaringan informasi dan komunikasi MKG melalui IDRIP	45.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar	2.100,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensitymeter dan *accelerograph* melalui IDRIP	53.199,3	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi meteorologi maritim *(Strengthening of Marine Meteorology)*	39.278,3	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Indonesia *Disaster Resillience Initiatives Project* (IDRIP)	90.651,4	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pengadaan perangkat pengolah data informasi tanda waktu	1.972,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin *(Windshear)* melalui FIR	100.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pemeliharaan operasional aloptama MKG didaerah	101.768,7	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) Wilayah Barat	1.400,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) Wilayah Tengah	1.973,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) Wilayah Timur	3.789,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana	1.770,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Sistem Informasi Bidang Kebencanaan	1.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Destana (Desa Tangguh Bencana)	78.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.020,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Masyarakat di Daerah Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	191,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	78.956,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi	3.226,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pos Pengamatan Gunung Api yang Dikembangkan	38.143,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	4.535,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Likuifaksi (Rekomendasi)	6.368,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SK No 188326 A

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur	17.875,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Geologi	4.087,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	449.792,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	14.164,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	93.400,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	8.324,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	3.919,7	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	1.554,3	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
43) MP: Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	**303.345,6**	
Pembentukan tim Respons Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Integrasi *Cyber Intelligent Analytics* (CIA)	30.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2024)	2.687,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
National Cyber Exercise (RKP 2024)	12.855,7	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang teregistrasi (RKP 2024)	1.838,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Penyelenggaraan Program *Born To Defence* untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV (RKP 2024)	1.463,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Penanganan Perkara Siber	4.547,2	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA. 2024	65.000,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Siber	85.631,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	5.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Revitalisasi Infrastruktur dan Jaringan Siber Pushansiber	25.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pembangunan Sistem Pertahanan Siber Utama	5.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pembangunan *Disaster Recovery Center* Pertahanan Siber	5.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pertahanan Secara Terintegrasi	5.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pengembangan Sistem Pertahanan Siber pada Infrastruktur Vital Kemhan	10.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN

SK No 188327 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / *Major Project*	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Sub CSIRT Kemhan	5.000,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Sertifikasi SDM Pertahanan Siber CSIRT Kemhan	2.500,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Sertifikasi SDM Pertahanan Siber Sub CSIRT Kemhan	2.500,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Penanganan Tindak Pidana Siber (PN)	11.843,1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
44) MP: Penguatan Keamanan Laut di Natuna	**188.089,2**	
Pembangunan Pangkalan Setokok	188.089,2	BADAN KEAMANAN LAUT

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu *Major Project*;
(2) Tidak seluruh RO/proyek pendukung *Major Project* ditampilkan;
(3) *Major Project* didukung oleh pendanaan dan investasi yang bersumber dari Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(4) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per bidang/subbidang per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2024;
(5) Alokasi pendanaan/investasi KPBU bersifat indikatif;
(6) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 190254 A